6.663-2010

Implementasi COREMAP

Di Kabupaten Sikka:

Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi

M I L I K
PERPUSTAKAAN PPK - LIPI

Implementasi COREMAP

Di Kabupaten Sikka:

Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi

Oleh:

DALIYO
SOEWARTOYO
SUMONO

M I L I K
PERPUSTAKAAN PPK - LIPI

COREMAP-LIPI

Coral Reef Rehabilitation and Management Program
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(COREMAP II – LIPI)
Jakarta, 2009

LIPI

© 2010 Indonesian Institute of Sciences (LIPI)
Pusat Penelitian Kependudukan bekerja sama dengan COREMAP*

Katalog dalam Terbitan

Implementasi COREMAP di Kabupaten Sikka: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi/Daliyo, Soewartoyo, Sumono – Jakarta: 2010.
xiv + 71 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-8717-47-2
1. Sumber Daya Laut – Kondisi Sosial Ekonomi

333. 911

LIPI

*Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI
Gedung Widya Graha Lt. X, Jl. Gatot Subroto 10
Jakarta Selatan, 12710
Telp.: (021) 5221687, 5251542 Psw. 720
Telp.: (021) 5207205, 5221687
E-mail: ppk-lipi@rad.net.id

PERPUSTAKAAN PPK - LIPI
HADIAH / ~~TUKAR / BELI~~ : Coremap
NO. INDUK : 6.663-2010
NO. KLASIFIKASI : 339.59.338.98(210.53)
PARAF :

KATA PENGANTAR

Pelaksanaan COREMAP fase II di beberapa lokasi di Indonesia Bagian Barat telah berjalan kurang lebih lima tahun. Selama kurun waktu pelaksanaan COREMAP tersebut, berbagai program dan kegiatan berkaitan dengan penyadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan terumbu karang, pengelolaan berbasis masyarakat dan pengawasan telah dilakukan.

Untuk melihat keberhasilan COREMAP dari aspek sosial – ekonomi, dilakukan kajian BME sosial - ekonomi. Kajian ini dilakukan pada awal, tengah dan akhir program. Kajian pada awal dan tengah program telah dilakukan pada tahun 2006 dan 2008. Kajian sosial – ekonomi tahun 2006 (T0) bertujuan untuk melihat kondisi sosial – ekonomi masyarakat sebelum program dan kegiatan COREMAP dilakukan. Sedangkan kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2008 (T1) bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP di daerah dan mengumpulkan data mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya tingkat pendapatan, untuk memantau dampak program COREMAP terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Kajian BME sosial – ekonomi pada tahun 2009 dilakukan untuk mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Buku ini merupakan hasil dari kajian BME sosial-ekonomi (T2) yang dilakukan pada tahun 2009 di lokasi-lokasi COREMAP di Indonesia Bagian Timur. BME sosial-ekonomi ini dilakukan oleh CRITC-LIPI bekerjasama dengan tim peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan - LIPI (PPK-LIPI) dan beberapa peneliti sosial dari kedeputian IPSK - LIPI.

Terlaksananya kegiatan penelitian dan penulisan buku ini melibatkan berbagai pihak. Penghargaan dan ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Pusat Penelitian Kependudukan – LIPI yang telah memberikan dukungan kepada tim peneliti melakukan studi ini. Kepada para informan yang terdiri atas masyarakat nelayan, ketua dan pengurus LPSTK dan POKMAS, pemimpin formal dan informal, tokoh masyarakat di Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa, kami ucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para pewawancara yang telah membantu pelaksanaan survai. Kami juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua narasumber dari berbagai unsur pengelola COREMAP di tingkat kabupaten: Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka, CRITC Kabupaten Sikka dan berbagai pihak yang ada di daerah yang telah membantu memberikan data dan informasi.

Jakarta, Desember 2009
Direktur NPIU CRITC COREMAP II-LIPI

Susetiono

RINGKASAN

Secara umum penelitian ini mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial -ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP, yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya tujuan khusus yang ingin dicapai adalah: (1). Mengkaji pengetahuan masyarakat tentang pelestarian terumbu karang dan kegiatan COREMAP; (2). Mengkaji perubahan perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut; (3). Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP; dan (4). Mengkaji manfaat sosial – ekonomi, baik langsung maupun tidak langsung dari kegiatan COREMAP.

Sumber data yang digunakan adalah dari hasil survei sosial ekonomi COREMAP tahun 2007, tahun 2008 dan tahun 2009. Data untuk analisis juga dari hasil wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, data sekunder dari beberapa instansi, dokumentasi dan observasi. Lokasi kajian di Kabupaten Sikka dan mengambil sampel di Desa Kojadoi mewakili kawasan pulau-pulau kecil dan Desa Namangkewa mewakili kawasan pantai di daratan.

Beberapa temuan dari kajian ini adalah :

- *Pengetahuan tentang pelestarian dan kegiatan COREMAP* - Di Desa Kojadoi sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang

pelestarian dan kegiatan COREMAP. Program COREMAP telah lama masuk (sejak tahun 2000 – COREMAP Fase I) dan dikenal masyarakat Kojadoi. Sebagian besar masyarakat merupakan rumah tangga nelayan yang kehidupan utamanya menggantungkan pada sumber daya laut. Sementara di Desa Namangkewa hanya kurang dari separoh penduduk sampel yang telah mengetahui tentang pelestarian dan kegiatan COREMAP. Meskipun program COREMAP telah lama masuk desa ini, karena sebagian besar masyarakatnya tidak menggantungkan kehidupan utamanya pada sumber daya laut. Sehingga perhatian sebagian besar masyarakat terhadap pengetahuan dan kegiatan yang terkait dengan pelestarian sumber daya laut, termasuk terumbu karang masih kurang.

- *Perubahan perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya laut* - Perubahan perilaku masyarakat yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut termasuk terumbu karang telah cukup besar. Di Desa Kojadoi dan Namangkewa penggunaan bom dan potasium untuk menangkap biota laut sudah tidak ada lagi dan pemakai alat tangkap tersebut biasanya berasal dari luar desa dan mereka telah menjadi musuh bersama. Alat tangkap yang digunakan para nelayan umumnya yang lebih ramah terhadap lingkungan termasuk terumbu karang. Di Desa Kojadoi sebagian besar nelayan telah lama beralih mata pencaharian dari nelayan tangkap menjadi nelayan budi daya rumput laut. Meskipun pada satu tahun terakhir usaha budi daya rumput laut sedang mengalami kehancuran karena hama dan penggunaan pupuk *green tonic* (GT) yang tidak ramah lingkungan. Akhir-akhir ini sebagian nelayan telah mulai kembali menangkap ikan di laut. Namun karena telah meningkatnya kesadaran tentang perlunya pelestarian sumber daya laut, maka mereka tetap tak mau lagi menggunakan alat tangkap yang merusak terumbu karang dan biota laut lainnya.

- *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP* - Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP di Desa Kojadoi sudah cukup besar. Kegiatan mulai dari pembentukan

kelembagaan LPSTK, pelatihan, kegiatan UEP dan *village grant* di desa ini cukup baik. Meskipun dana bergulir untuk kegiatan UEP pada tahun terakhir agak terhambat belum dicairkan, karena belum siapnya pengurus LKM dan masyarakat. Meskipun demikian, umumnya masyarakat mengharapkan kegiatan COREMAP terus dilanjutkan termasuk dana bergulir untuk menguatan modal usaha budi daya rumput laut.

Di Desa Namangkewa hanya sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi dan kegiatan COREMAP. Hal ini disebabkan karena sebagian besar masyarakat tidak menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut.

- *Manfaat sosial kegiatan COREMAP* - Manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan COREMAP selama ini untuk Desa Kojadoi adalah dengan adanya dana *village grant* untuk MCK dan air bersih telah meningkatkan kesehatan dan sanitasi masyarakat. Sedangkan program pengadaan listrik bermanfaat untuk penerangan rumah, penerangan belajar anak dan sebagai sumber informasi melalui televisi dan radio. Di Desa Namangkewa dana *village grant* untuk pembangunan bak air dan pipanisasi. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan kebutuhan air bersih dan kesehatan.

- *Manfaat ekonomis kegiatan COREMAP* - yang berupa dana bergulir untuk penguatan modal usaha belum dirasakan. Di Kojadoi dana bergulir belum didistribusikan ke masyarakat, karena LKM dan masyarakat belum siap. Sementara di Desa Namangkewa distribusi dana bergulir telah dilakukan dan hanya sebagian kecil (15 persen) anggota Pokmas yang telah menerima pinjaman dana bergulir. Pencairan dana belum ada satu bulan dari waktu kajian dilakukan, sehingga belum dapat diketahui dampaknya terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Baik di Kojadoi maupun di Namangkewa ada keluhan dari pengurus LKM bahwa belum pernah ada pelatihan-pelatihan tentang cara pengelolaan dan prosedur

peminjaman dana bergulir, juga belum memiliki buku pedoman pengelolaan dana bergulir.

Rekomendasi

- Pengetahuan tentang pelestarian terumbu karang dan biota laut harus terus berlanjut dan ditingkatkan, agar masyarakat tidak kembali melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang merusak. Hal ini terutama di Desa Namangkewa banyak masyarakat yang pengetahuannya tentang terumbu karang masih harus ditingkatkan.
- Peningkatan tingkah laku yang tidak merusak kelestarian terumbu karang harus terus dipertahankan dan ditingkatkan dengan terus memberikan kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan pondok informasi yang selama ini belum berfungsi. Pondok informasi harus diperkaya dengan buku-buku dan pamlet-pamlet yang memadai. Juga perlunya sosialisasi melalui sekolah-sekolah yang dulu pada COREMAP Fase I pernah ada, namun akhir-akhir ini mulai melemah lagi karena kurangnya sarana sosialisasi (buku-buku tentang kegiatan COREMAP dan pamlet-pamlet tentang COREMAP).
- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menggunakan pupuk GT (*green tonic*) yang ternyata sangat merusak lingkungan dan mematikan biota laut termasuk rumput laut, terutama di Desa Kojadoi. Dalam hal ini program COREMAP dituntut harus mampu menjelaskan kepada masyarakat.
- Dana bergulir untuk penguatan modal usaha untuk mulai kembali budi daya rumput di Desa Kojadoi perlu ditingkatkan jumlahnya dan segera diturunkan ke masyarakat nelayan, agar ekonomi mereka segera bangkit lagi. Hanya dalam membudidayakan rumput laut kembali tersebut, perlu pendampingan dan kajian lingkungan, apakah perairan di Desa Kojadoi sudah bisa ditanam kembali rumput laut. Sedangkan untuk pemasaran hasil perlu peran koperasi yang ada dihidupkan kembali. Di Desa Namangkewa dana bergulir

juga harus ditingkatkan jumlahnya, agar dapat menyentuh lebih banyak anggota masyarakat utamanya rumah tangga nelayan, agar kesejahteraan mereka meningkat.

- Baik di Desa Kojadoi maupun di Namangkewa kualitas dan peran LKM harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan cara pengelolaan dana bergulir yang baik disertai pemberian pedoman-pedoman tertulis yang jelas atau mudah dipahami dan dilaksanakan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		iii
RINGKASAN		v
DAFTAR ISI		xi
DAFTAR TABEL		xiii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Tujuan	3
	1.3. Metodologi	3
	1.3.1. Lokasi	3
	1.3.2. Pendekatan	4
	1.3.3. Instrumen	5
	1.4. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan COREMAP	5
	1.4.1. Kegiatan Bidang PA (*Public Awareness*) dan CRITC	6
	1.4.2. Kegiatan Bidang MCS	6
	1.4.3. Kegiatan Bidang CBM *(Community-Based Management)* atauPengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)	8
	1.4.4. Pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa	9

BAB II PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN COREMAP 19
2.1. Pengetahuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut (SDL) 20
2.1.1. Pengetahuan penduduk dalam pengelolaan SDL Desa Kojadoi 20
2.1.2. Pengetahuan penduduk dalam pengelolaan SDL Desa Namangkewa 22
2.2. Pengetahuan dan Partisipasi Dalam Kegiatan COREMAP 23
2.2.1. Pengetahuan dan partisipasi penduduk dalam kegiatan COREMAP Desa Kojadoi 23
2.2.2. Pengetahuan dan partisipasi Penduduk dalam kegiatan COREMAP Desa Namangkewa 31

BAB III MANFAAT SOSIAL - EKONOMI KEGIATAN COREMAP 39
3.1. Manfaat Sosial Kegiatan COREMAP 40
3.1.1. Kegiatan *village grant* 40
3.1.2. Kegiatan LKM (UEP) 41
3.2. Manfaat Ekonomi Kegiatan COREMAP 43
3.2.1. Kecenderungan perubahan pendapatan masyarakat dan faktor yang berpengaruh 43
3.2.2. Kecenderungan perubahan pandapatan dari kegiatan COREMAP 56

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 63
4.1. Kesimpulan 63
4.2. Rekomendasi 65

DAFTAR PUSTAKA 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Matriks Implementasi Program COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka Sampai Mei 2009 16

Tabel 2.1 : Pengetahuan Responden tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Desa Kojadoi, 2008 21

Tabel 2.2 : Pengetahuan Responden tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut, di Desa Namangkewa 23

Tabel 2.3 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pembentukan Lembaga Sumber Daya Terumbu Karang, Desa Kojadoi, 2008 26

Tabel 2.4 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pelatihan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008 27

Tabel 2.5 : Pengetahuan dan Partisipasi Responden Tentang Pendampingan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008 28

Tabel 2.6 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Kegiatan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008 30

Tabel 2.7 :	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang, Desa Namangkewa, 2008	33
Tabel 2.8 :	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pelatihan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008	34
Tabel 2.9 :	Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Kegiatan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008	36
Tabel 3.1 :	Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab.Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009	46
Tabel 3.2 :	Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok/Kategori Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab.Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009	47
Tabel 3.3 :	Distribusi Pendapatan Menurut Lapangan Kerja/ Sektor, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009	49
Tabel 3.4 :	Statistik Pendapatan Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan, Tahun 2006 – 2009 Menurut Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka	50
Tabel 3.5 :	Distribusi Persentase Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 – 2009	51
Tabel 3.6 :	Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita,Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009	53

Tabel 3.7 : Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok/ Kategori Pendapatan, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab.Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009 54

Tabel 3.8 : Distribusi Pendapatan Menurut Lapangan Kerja/ Sektor, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009 55

Tabel 3.9 : Statistik Pendapatan Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan, Tahun 2006 – 2009 Menurut Musim, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka 56

Tabel 3.10 : Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Yang Mendapat/ Tidak Dana Bergulir Selain COREMAP II, Desa Kojadoi, 2009 59

Tabel 3.11 : Rata-rata Pendapatan Anggota Pokmas COREMAP II dan Bukan Anggota Pokmas 60

Tabel 3.12 : Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Yang Mendapat/ Tidak Dana Bergulir Selain COREMAP II, Desa Namangkewa, 2009 62

Tabel 5.1 : Resume Keberhasilan Pelaksanaan COREMAP di Desa Kojadoi dan Namangkewa 67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sikka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak di Pulau Flores. Daerah ini menjadi daerah sasaran program COREMAP di Wilayah Indonesia Timur, di samping di daerah-daeah lainnya di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur, seperti Biak, Selayar, Buton, Wakatobi, Raja Ampat dan lainnya. Sebagai kabupaten yang memiliki wilayah pesisir, laut dan wilayah kepulauan, daerah ini juga memiliki kawasan terumbu karang yang cukup luas. Akhir-akhir ini luas seluruh terumbu karang di perairan daerah ini diperkirakan masih sekitar 14.500,4 hektar. Penyebaran kawasan terumbu karang di daerah ini terletak di perairan wilayah selatan dan wilayah utara. Dari seluruh kawasan tersebut ada sekitar 40 persen terumbu karang dalam kondisi rusak. Data dari PMU-COREMAP Kabupaten Sikka (2005) menunjukkan bahwa ternyata terumbu karang yang paling banyak mengalami kerusakan terletak di kawasan perairan utara Kabupaten Sikka atau di Teluk Maumere. Dari sumber yang sama juga memperkirakan terumbu karang di kawasan utara ini hanya sekitar 10 persen yang masih dianggap baik. Dengan demikian, sebagian besar telah mengalami kerusakan (PMU – COREMAP Kab. Sikka, 2005). Pada

periode tahun 1999/2000 – 2003/2004 merupakan COREMAP Fase I dilakukan di Kabupaten Sikka. Program tersebut memperoleh bantuan dana dari Aus-AID (*Australian Agency for International Development*). Pada periode tersebut sasaran hanya diberikan wilayah pantai/ kepulauan di wilayah utara. Sasaran hanya dilakukan di 6 desa pesisir/ kepulauan, yakni Desa Nangahale, Namangkewa, Wuring, Wolomarang, Kojadoi dan Perumaan. Namun dalam COREMAP Fase II dengan bantuan dana dari Bank Dunia (*World Bank*) sasaran program meningkat tajam menjadi 34 desa pesisir/kepulauan. Desa-desa tersebut berada di wilayah utara dan selatan Kabupaten Sikka. Desa-desa tersebut meliputi desa-desa sasaran COREMAP Fase I, yaitu Nangahale, Namangkewa, Wuring, Wolomarang, Kojadoi dan Perumaan. Selanjutnya ditambah desa-desa wilayah pesisir utara yang belum ikut pada fase I dan pesisir selatan, yakni Lewomada, Wailawung, Bangkoor, Darat Pantai, Pruda, Hoeder, Watudiran, Kojagete, Pemana, Gunung Sari, Samparong, Kota Uneng, Hewuli, Kolisia, Reroroja, Maluriwu, Reruwairere, Lidi, Ipir, Hebing, Sikka, Watuledang, Lela, Korobhera. Paga, Mbengu dan Wolowiro (Daliyo, Soewartoyo, Sumono dan Zainal Fatoni, 2008).

Indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi tercapainya tujuan COREMAP dapat dilihat dari 2 aspek utama, yaitu aspek biofisik dan aspek sosial – ekonomi. Aspek biofisik mengharapkan dapat tercapai peningkatan tutupan karang paling sedikit 5 persen per tahunnya. Dalam akhir program diprediksikan tercapai kondisi yang hampir sama dengan kawasan yang telah dikelola secara baik atau *pristine area* atau daerah terumbu karang yang masih asli/ belum dimanfaatkan. Keberhasilan COREMAP dalam aspek sosial – ekonomi dalam suatu daerah adalah : (1). Apabila pendapatan penduduk dan jumlah penduduk yang menerima pendapatan dari kegiatan ekonomi yang berbasis terumbu karang dan kegiatan ekonomi alternatif lainnya, mengalami kenaikan sebesar 10 persen pada akhir program (tahun 2009); dan (2). Paling sedikit 70 persen dari rumah tangga nelayan (*beneficiary*) di kabupaten program merasakan dampak positif COREMAP.

Dalam hal ini dampak pada tingkat kesejahteraannya dan status sosial – ekonominya (Word Bank, Project Appraisal Document, 2004). Dampak ekonomi, adanya peningkatan ekonomi rumah tangga dan pemilikan armada, alat tangkap sampai pemilikan barang berharga lainnya. Dalam aspek sosial dapat dilihat dari meningkatnya pengetahuan penduduk tentang penyelamatan terumbu karang, partisipasi dalam program-program yang terkait dengan penyelamatan dan pelestarian terumbu karang dan perubahan perilaku masyarakat yang mengarah pada penyelamatan dan pelestarian terumbu karang.

1.2. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan dari penelitian adalah mengkaji pelaksanaan COREMAP dari aspek sosial -ekonomi yang dikaitkan dengan tujuan program COREMAP, yaitu tercapainya pelestarian terumbu karang dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah:

1. Mengkaji pengetahuan masyarakat tentang pelestarian terumbu karang dan kegiatan COREMAP.
2. Mengkaji perubahan perilaku masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut.
3. Mengkaji partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP
4. Mengkaji manfaat sosial - ekonomi (langsung dan tidak langsung) dari kegiatan COREMAP

1.3. Metodologi

1.3.1. Lokasi

Lokasi kajian adalah desa-desa COREMAP yang pernah dikaji sebelumnya, yaitu pada tahun 2007 dan 2008 atau lokasi T0 dan T1. Lokasi tersebut adalah: (1). Untuk kawasan pulau-pulau kecil dipilih *Desa Kojadoi,* Kecamatan Alok Timur (tahun 2007 desa ini masih

termasuk wilayah Kecamatan Maumere), Kabupaten Sikka. Karena ada pemekaran kecamatan, sejak tahun 2008 dimasukkan wilayah Kecamatan Alok Timur. (2). Kawasan daratan, dipilih *Desa Namangkewa*, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka. Sebelum tahun 2007 Desa Namangkewa memiliki banyak penduduk yang mendiami wilayah pantai. Namun sejak ada pemekaran wilayah desa, sebagian wilayah Namangkewa dimasukkan wilayah desa-desa lain dan desa-desa tersebut tidak menjadi desa sasaran COREMAP Fase II. Hanya Desa Namangkewa wilayah baru yang masih tetap sebagai daerah binaan COREMAP Fase II. Sementara desa-desa sekitarnya walaupun memiliki wilayah pantai dan sebagian penduduknya sebagai nelayan yang menggantungkan hidupnya dari pemanfaatan sumber daya laut tidak menjadi daerah binaan COREMAP Fase II.

1.3.2. Pendekatan

a. *Pendekatan kuantitatif* – dengan menggunakan survei terhadap 100 rumah tangga (kembali ke sampel baseline T1 – tahun 2008) di masing-masing lokasi. Responden adalah kepala rumah tangga yang pernah diwawancarai pada kajian tahun 2008 yang lalu. Untuk Desa Namangkewa, karena adanya pemekaran wilayah hanya 54 rumah tangga yang masih bisa dipertahankan untuk diwawancarai lagi, 46 rumah tangga lainnya telah menjadi warga di luar Namangkewa, yaitu di Desa Geliting dan Desa Waiara. Dua desa tersebut pada COREMAP Fase II tidak menjadi daerah sasaran COREMAP. Hanya Desa Namangkewa yang tetap menjadi daerah sasaran program COREMAP, meskipun jumlah rumah tangga yang kehidupannya dari usaha di laut (perikanan tangkap dan budi daya biota laut) kecil jumlahnya.

b. *Pendekatan kualitatif* - dilakukan dengan menggunakan wawancara terbuka dengan para tokoh masyarakat, fasilitator desa, aparat desa, ketua dan bendahara lembaga keuangan mikro, pengelola program bantuan desa, koperasi dsb. FGD

dilakukan terhadap beberapa nelayan. Observasi dan dokumentasi foto untuk melihat kenyataan di lapangan.

1.3.3. Instrumen

a. Untuk kegiatan survei menggunakan instrumen daftar pertanyaan. Daftar pertanyaan terdiri dari : (1). Pengenalan Tempat, Keterangan Rumah Tangga; (2). Keterangan Pencacahan; (3). Ekonomi Rumah Tangga; (4). Pemilikan Aset Rumah Tangga; (5). Partisipasi dan Manfaat COREMAP; dan (6). Partisipasi dan Manfaat Program/ batuan selain COREMAP. Sebagian analisis juga masih memggunakan data yang dikumpulkan tahun 2008 yang masih relevan dengan tujuan penelitian.

b. Panduan pengumpulan data kualitatif – informasi yang akan diungkap meliputi : (1). Kegiatan UEP COREMAP – (a). jenis kegiatan ekonomi; (b). pelaksanaan, permasalahan dan solusinya; (c). peran pengurus dan anggota kelompok UEP; (d). peran LKM, MD, CF; dan (d). permasalahan dalam pengembangan usaha. (2). *Village grant* meliputi : (a). jenis kegiatan dan kesesuaian dengan RPTK dan aspirasi masyarakat; (b). pelaksanaan, permasalahan dan solusinya; (c). keterlibatan masyarakat dalam kegiatan *village grant;* (d). manfaat dan permasalahan dalam pelaksanaan *village grant.* (3). pandangan masyarakat tentang manfaat COREMAP.

1.4. Gambaran Pelaksanaan Kegiatan COREMAP

Dalam subbab ini sepintas akan membahas tentang program-program COREMAP Fase II yang ada dan bagaimana pelaksanaan/ implementasinya dengan berbagai permasalahan dan kendalanya. Pembahasan meliputi program dan implementasi pada tingkat makro kabupaten (Kabupaten Sikka) serta program dan implementasi di tingkat mikro desa (Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa).

1.4.1. Kegiatan bidang PA (*Public Awareness*) dan CRITC

Kegiatan dua bidang CRITC dan PA pada saat ini kurang ada kegiatan. Khusus untuk bidang CRITC sedang tidak ada kegiatan, sebab kebetulan koordinator bidang tersebut sedang tidak aktif lantaran akhir-akhir ini sedang sibuk mengikuti pencalonan diri sebagai calon Bupati Kabupaten Sikka.

1.4.2. Kegiatan bidang MCS

Kegiatan utama MCS adalah pengawasan laut, untuk menghindari atau menjaga agar tidak terjadi perusakan laut yang akan mengganggu kelestarian terumbu karang. Di samping itu, MCS juga melakukan pembinaan Pokmaswas (Kelompok Masyarakat-Pengawasan) di Kabupaten Sikka ada di 34 desa binaan COREMAP. MCS sebagai bagian dari PMU juga melibatkan berbagai *stakeholders* yang berhubungan dengan pengawasan kelautan. *Stakeholders* tersebut meliputi Lanal, Polres, Kejari, Rapi, LSM dan DKP sebagai ketua tim.

Anggota MCS mempunyai perbedaan fokus pengawasan kelautan, maka dalam pelaksanaan tugasnya perlu koordinasi yang baik agar masing-masing instansi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sebelum turun melakukan pengawasan kelautan tim mengadakan pertemuan untuk menentukan sasaran pengawasan. Daerah rawan di Kabupaten Sikka cukup tersebar dan bervariasi, yaitu kerawanan disebabkan karena sering terjadi pengeboman ikan dan penangkapan ikan dengan menggunakan potasium. Kegiatan perusakan ini dilakukan oleh nelayan daerah setempat maupun nelayan pendatang dari daerah lain. Di samping mengadakan patroli di daerah tersebut, maka tim MCS-COREMAP juga melakukan pembinaan terhadap Pokmaswas di desa terdekat dengan lokasi patroli. Masing-masing anggota tim melakukan pengawasan sesuai dengan tugas pokoknya, akan tetapi mereka juga akan saling memberikan informasi bila terjadi hal yang dapat dikembangkan untuk ditanggulangi bersama. Apabila tim menemukan kejadian pengeboman, atau penangkapan ikan dengan potasium, maka

pihak Polri akan memeriksa pelaku sebagai tindakan kriminal, sedang tim COREMAP akan menganalisis kemungkinan kerusakan yang terjadi akibat tindakan pengeboman tersebut terhadap kemungkinan kerusakan biota laut termasuk terumbu karang.

Menurut para informan, pengawasan rutin dilakukan sejak tahun 2006 sampai sekarang 2009 sebanyak 3 kali setiap bulan dan selama 10 bulan dalam satu tahun. Setiap temuan dalam kegiatan pengawasan kelautan, maka informasinya akan dikoordinasikan kepada bidang lain, terutama CBM dan PA agar ditindaklanjuti dengan penyadaran masyarakat dan kewaspadaan masyarakat desa terhadap ancaman kerusakan laut. Pembinaan Pokmaswas perlu ditingkatkan sebab bila Pokmaswas di desa cukup aktif, maka pengawasan laut sekitar desa dapat selalu terjaga. Apabila Pokmaswas menemukan gejala yang kurang baik, seperti penggunaan potasium, maka bisa dengan persuasif melarang masyarakatnya agar mereka menyadari bahwa penggunaan potasium dapat merusak kelestarian lingkungan laut. Bila Pokmaswas dapat menemukan pelanggaran yang lebih serius yang dilakukan oleh masyarakat dari luar, maka Pokmaswas dapat segera mengkomunikasikan kepada tim MCS. Selanjutnya ketua tim akan berkoordinasi dengan polisi untuk melakukan penangkapan.

Dari gambaran kegiatan tersebut di atas, maka pembinaan Pokmaswas sangat penting. Beberapa kegiatan pembinaan antara lain memberikan pengetahuan kepada Pokmaswas tentang Sistim Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Demikian pula sering dilakukan Apel Siaga untuk menjaga kesiapan anggota Pokmaswas. Di samping pembinaan terhadap Pokmaswas COREMAP juga membangun pos pengawasan dan radio. Pos pengawasan sudah tersedia di semua desa binaan, akan tetapi peralatan radio sebagai alat komunikasi dan penyebaran informasi belum sepenuhnya terpenuhi karena kendala perizinan dan dana. Untuk menopang kegiatan Pokmaswas telah disediakan kapal/perahu (*response boat*) untuk 3 desa, sedang alat patroli tim MCS tersedia satu *speed boat*. Dengan terbatasnya alat

komunikasi, baik radio maupun transportasi laut akan mengganggu pelaksanaan tugas pengawasan pada masa mendatang.

1.4.3. Kegiatan bidang CBM *(Community-Based Management)* atau Pengelolaan Berbasis Masyarakat (PBM)

Fokus kegiatan CBM menurut informan bidang ini di Kabupaten Sikka adalah pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kelembagaan masyarakat. Kegiatan COREMAP dalam rangka CBM telah mencakup di 34 desa dari sekitar 56 desa di Kabupaten Sikka. Dalam melakukan kegiatannya CBM tidak terlepas dengan kegiatan bidang lainnya, terutama PA, MCS dan CRITC. Penyadaran masyarakat (PA) tidak terlepas dengan kegiatan PBM, karena kesadaran masyarakat penting untuk menjaga kelestarian terumbu karang. Pengenalan serta edukasi tentang terumbu karang dilakukan oleh PA melalui materi muatan lokal di sekolah-sekolah desa sasaran. Demikian juga pemberdayaan masyarakat tidak akan berjalan tanpa kegiatan pengamanan serta bahan maupun hasil penelitian yang relevan berkaitan dengan terumbu karang bagi kehidupan masyarakat target.

Sebagai bidang yang bertanggungjawab pada pemberdayaan masyarakat dalam melaksanakan konsep pemberdayaan berbasis masyarakat. Oleh karena itu, dalam kegiatannya selalu mendasarkan diri pada metode PRA (*Participatory Rapid Asessment*) dan dalam pembentukan kelompok masyarakat dilakukan dengan metode OSA (*Organization Self Assessment*). Dalam rangka melaksanakan konsep tersebut CBM dibantu oleh Fasilitator Desa (FD) dan Motivator Desa (MD). Di tingkat kabupaten Koordinator Fasilitator Desa disebut SETO (*Senior Extension and Training Officer*). Fasilitator Desa, *Community Fasilitator* (CF/SETO) diangkat oleh COREMAP melalui proses pelelangan, jadi bukan orang desa setempat. Sedang Motivator Desa memang diangkat dari dan oleh masyarakat desa sasaran. Jumlahnya MD sebanyak 2 orang, terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan.

Dari pembahasan pelaksanaan COREMAP Fase II di tingkat kabupaten menunjukkan bahwa pembentukan LPSTK (Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang), dan pembuatan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) merupakan lembaga tingkat desa yang penting dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP. Setelah LPSTK terbentuk, maka pengurus LPSTK bersama Fasilitator Desa memilih 2 orang (laki dan perempuan) sebagai Motivator Desa. Motivator Desa tersebut yang akan bertugas di tingkat desa. Mereka harus berasal dari di antara masyarakat desa setempat. LPSTK tersebut selanjutnya melakukan kegiatan penyusunan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) untuk desanya dengan metode PRA. Sedangkan pembentukan kelompok masyarakat (Pokmas) dengan menggunakan metode OSA.

1.4.4. Pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Nawangkewa

- *Pembentukan dan kinerja kelembagaan Desa Kojadoi*

LPSTK Desa Kojadoi sebagai pusat pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat desa baru terbentuk tahun 2007. Panitia pemilihan calon pengurus LPSTK terdiri dari Motivator Desa, ketua Pokmas, fasilitator dan aparat pemerintah desa. Panitia mengundang masyarakat, yaitu : tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, agama, dan anggota pokmas. Masing-masing anggota masyarakat mengajukan calon ketua, yang kemudian disaring sesuai dengan persyaratan sebagai ketua.

Kelompok-kelompok masyarakat (Pokmas-Pokmas) telah terbentuk di Desa Kojadoi. Pokmas tersebut berfungsi sebagai pelaksana kegiatan COREMAP sesuai dengan bidangnya. Terdapat 4 jenis Pokmas di Desa Kojadoi, yaitu : *Pertama,* Pokmas Konservasi yang telah dibentuk sejak tahun 2002 (COREMAP Fase I). *Kedua,* Pokmas Usaha Ekonomi Produktif, yang sudah terbentuk sejak COREMAP Fase I. *Ketiga,* Pokmas Perempuan/ Jender telah terbentuk pada tahun 2004. *Keempat,* adalah Pokmas Rumput Laut. Kegiatan Pokmas tersebut meliputi

pemberian modal untuk budi daya rumput laut (dengan sistim simpan pinjam) dan mengontrol anggotanya yang menerima pinjaman modal. Masing-masing Pokmas tersebut beranggotakan sekitar 30 orang, kecuali Pokmas Perempuan yang anggotanya lebih banyak.

Setelah pengurus LPSTK berhasil terbentuk, kemudian dilakukan pelatihan penguatan fungsi kelembagaan (LPSTK) antara lain pembahasan/ diskusi tentang keadaan desa yang meliputi tentang potensi desa dan permasalahannya. Metode yang digunakan adalah PRA (*Partisipatory Rural Apraisal*) Hasil PRA tersebut sebagai bahan untuk penyusunan RPTK. Pengkajian tentang keadaan desa dengan metode PRA tersebut merupakan bagian dalam penyusunan RPTK. Kegiatan tersebut baru dilaksanakan dalam bulan Januari 2007.

Penyusunan RPTK baru dapat diselesaikan pada bulan Nopember 2007. Dalam penyusunan RPTK diperlukan partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi oleh SETO dan CF. Hasil RPTK diharapkan benar-benar berisi kondisi riil masyarakat desa. Materi yang dipakai untuk penyusunan RPTK adalah dari hasil kajian cepat (PRA), hasil kajian partisipatif melalui metode PRA, hasil studi *base-line data* dan monitoring CRITC serta referensi yang relevan untuk pembuatan RPTK baik dari aspek legal maupun teknis. Tim penyusunan dokumen RPTK Desa Kojadoi terdiri dari unsur Pemerintah Desa, unsur BPD, unsur LPSTK, unsur LKM, unsur tokoh masyarakat, Pokmaswas, MD dan CF yang difasilitasi langsung oleh SETO dan PMU Kabupaten Sikka.

- *Pembentukan dan kinerja kelembagaan di Desa Namangkewa*

Pembentukan pengurus LPSTK Desa Nawangkewa sebagai pelaksanaan kegiatan COREMAP di tingkat desa baru terbentuk pada bulan Juli tahun 2006. Pada waktu itu panitia pembentukan LPSTK mengundang para tokoh masyarakat dan aparat pemerintah desa untuk mengadakan pertemuan. Dalam pertemuan tersebut telah berhasil menunjuk ketua, sekretaris dan bendahara LPSTK. Di sini LPSTK bertugas sebagai pelaksana kegiatan COREMAP Fase II dan diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Desa.

Kelompok masyarakat (Pokmas) juga telah terbentuk di Desa Namangkewa. Pokmas berfungsi sebagai pelaksana kegiatan COREMAP sesuai dengan bidangnya. Menurut informasi dari MD hasil identifikasi Pokmas pada bulan April 2006 di Desa Nawangkewa terdapat 18 Pokmas. Nama Pokmas tersebut antara lain: Pokmas Bintang Laut, Pokmas Bunga Mawar, Pokmas Perkumpulan Keluarga Berencana, Pokmas CU Rhena Rosary dan sebagainya. Pokmas di Desa Nawangkewa tidak hanya untuk kelompok nelayan tetapi juga untuk kelompok lain sesuai dengan mata pencaharian atau keinginannya. Pokmas di Desa Namangkewa terdiri dari 5 unit CU (*Credit Union*) dan 13 unit Kelompok Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Sampai pada saat penelitian dilakukan Pokmas di Desa Namangkewa merasa belum pernah ada kegiatan dari COREMAP Fase II. Mereka merasa bosan menunggu, karena COREMAP Fase II hanya membentuk kelompok saja, belum ada kegiatan pembinaan dan memberi kegiatan pada kelompok. Adanya kegiatan-kegiatan Pokmas di Desa Namangkewa selama ini bukan berasal dari COREMAP, tetapi dari program lain, yaitu PPK (Program Pengembangan Kecamatan).

Setelah terbentuknya LPSTK dan Pokmas (identifikasi pokmas yang ada) kegiatan kelembagaan adalah mengadakan diskusi dengan masyarakat untuk mengkaji kondisi desa dan menetapkan masalah dihadapi dan potensi yang dapat dikembangkan. Metode yang dipakai dalam kajian keadaan desa seperti di Desa Kojadoi sesuai dengan sosialisasi dari pihak PMU adalah PRA (*Partisipatory Rural Appraisal*). Metode ini dipilih karena dapat mengajak masyarakat secara bersama memikirkan dan mengkaji keadaan desanya (masalah dan potensi) untuk kemudian dicarikan alternatif penyelesaiannya. Dengan metode ini diharapkan masyarakat dapat mengenali masalah desanya dan potensi yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraannya. Hasil dari pengkajian ini akan menjadi acuan dalam penyusunan RPTK (Rencana Pengelolaan Terumbu Karang) sebagai pedoman untuk pembangunan desanya. Kegiatan PRA telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2007 dengan mengundang 30 orang masyarakat yang terdiri dari para tokoh masyarakat, tokoh agama, pokmas, kaum perempuan, kadus, petani,

nelayan, pengusaha jasa, tenaga medis, tokoh pendidik, aparat desa dan BPD. Untuk melaksanakan kegiatan ini telah dibentuk tim PRA dari unsur masyarakat dan Fasilitator Desa. Sedang Motivator Desa berperan sebagai pendamping. Hasil dari PRA akan dipakai sebagai bahan untuk menyusun RPTK ditambah dengan data lain yang diperlukan untuk pengelolaan dan kegiatan COREMAP Fase II .

- *Kegiatan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi*

Kegiatan COREMAP Fase II dilihat dari dokumen RPTK baru diselesaikan pada bulan Nopember 2007. Kegiatannya sampai penelitian ini dilakukan (2008) baru dilaksanakan kurang dari satu tahun. Kegiatan sebelumnya masa persiapan pelaksanaan COREMAP Fase II yang secara formal telah dimulai 3 tahun sebelumnya (2004) di Kabupaten Sikka. Kegiatan yang dilakukan sebelum tersusunnya RPTK sifatnya persiapan, sosialisasi tujuan COREMAP Fase II dan pembentukan pokmas dan LPSTK sebagai pelaksana kegiatan COREMAP Fase II.

Kegiatan-kegiatan secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan ekonomi produktif, yakni koperasi simpan pinjam dan kios serta budi daya rumput laut merupakan kegiatan lanjutan yang telah dirintis sejak dari COREMAP Fase I. Kegiatan setelah disusunnya RPTK adalah sosialisasi RPTK kepada masyarakat luas. Dari dokumen yang ada beberapa kegiatan COREMAP Fase II tahun 2007/2008 antara lain : kegiatan pemanfaatan dana *Village Grant* di 34 desa sasaran tahun 2007 (PMU Kab Sikka, 2007). Kegiatan tersebut untuk Desa Kojadoi berupa :
   a. Pengadaan dan pemasangan mesin listrik 1 unit (komplit) dengan kapasitas 10 Kw Merk Dongfeng 34 Hp. Kegiatan tersebut ditempatkan di Dusun Koja Besar, dan dana yang disediakan sebesar Rp.18.000.000,- dan dari partisipasi masyarakat sebesar Rp11.350.000,-

b. Pembangunan fasilitas MCK di Dusun Margayong (4 unit) dengan dana masing-masing Rp.6.000.000,- jumlah seluruhnya Rp. 24.000.000,-
c. Pengadaan unit *reverse osmosis* (Komplit) dengan dana sebesar Rp.30.000.000,-
d. Pengadaan perahu motor desa 1 unit dengan kapasitas 3 ton dan mesin 22 PK, dengan dana sebesar Rp. 11.000.000,-

Dari dokumen tersebut dapat diketahui bahwa setelah tersusunnya RPTK terdapat bantuan dari *Village Grant* dengan jumlah dana sebesar Rp. 83.000.000,-. Kegiatan tersebut tidak terkosentrasi di satu dusun, tetapi tersebar di tiga dusun sesuai dengan kebutuhan masing-masing dusun. Menurut hasil wawancara dengan masyarakat pertengahan tahun 2009, kegiatan yang sudah dilaksanakan sampai saat ini dari dana *Village Grant* adalah pengadaan alat transportasi motor laut desa di Dusun Koja Besar, pengadaan listrik di Koja Besar, pipanisasi air bersih di Dusun Kojadoi dan 4 unit MCK di Dusun Margayong.

2. Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2008 adalah pembangunan Pondok Informasi. Menurut dokumen dari PMU Kabupaten Sikka untuk Desa Kojadoi pembangunan Pondok Informasi tersebut baru mencapai 75 persen. Dalam hal ini diharapkan partisipasi masyarakat adalah sebesar Rp.2.500.000. Pada bulan Januari 2008 dana tersebut baru bisa dicairkan dan pembangunan dimulai pada bulan Februari 2008 setelah diadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang manfaatnya Pondok Informasi. Kendala yang dihadapi adalah pada bulan Februari musim ombak dan angin besar, sehingga pembangunan dihentikan sementara dan baru bulan Maret dilanjutkan dan bulan April selesai dibangun. Menurut para informan pada saat ini Pondok Informasi sudah dapat dirampungkan 100 persen dan sudah mulai berfungsi. Pondok Informasi dilengkapi dengan buku-buku tentang terumbu karang dari PMU. Selain buku-buku di Pondok Informasi juga dilengkapi dengan poster dan struktur pengurus LPSTK. Buku mulok

(muatan lokal) juga disediakan di Pondok Informasi, namun jumlahnya masih terbatas.

3. Kegiatan Pokmaswas Desa Kojadoi selama ini antara lain telah melakukan monitoring dan penyadaran masyarakat. Pengawasan langsung ke laut belum dapat dilakukan, karena mereka belum mempunyai fasilitas kapal motor untuk patroli. Radio panggil untuk komunikasi dengan pihak keamanan laut belum dimiliki, sehingga bila ada peristiwa kejadian di laut (misalnya pengeboman di wilayah terumbu karang), maka fasilitas *handphone* pribadi yang digunakan. Menurut pihak MCS dalam anggaran yang akan datang dicoba untuk memfasilitasi dengan kapal motor dan alat radio panggil. Selama ini baru ada 3 desa dari 34 desa binaan yang mendapatkan fasilitas tersebut.

4. Beberapa pelatihan telah diadakan oleh COREMAP Fase II. Namun pelatihan tersebut masih terbatas untuk para pengurus. Pelatihan tersebut antara lain berupa pelatihan penguatan manajemen kelembagaan untuk pengurus LPSTK dan Pokmas. Pelatihan penyusunan Perdes yang diikuti oleh BPD dan pelatihan ekonomi produktif khususnya budi daya rumput laut yang diikuti oleh MD. Budi daya rumput bagi masyarakat sudah banyak diketahui masyarakat karena kegiatan memelihara rumput laut sudah lama dilakukan, yaitu terutama sejak COREMAP Fase I. Sebetulnya masyarakat Desa Kojadoi memerlukan pelatihan tentang pengolahan rumput laut, agar mereka dapat mendapatkan nilai tambah dari kegiatan tersebut. Masyarakat juga berharap dapat dibangun pabrik pengolahan rumput laut sehingga akan menguntungkan masyarakat banyak, baik keuntungan untuk pemasaran hasil maupun terbukanya peluang kerja bagi masyarakat desa.

- *Kegiatan COREMAP Fase II Desa Namangkewa*

Kegiatan program COREMAP Fase II di Desa Nawangkewa berpedoman pada RPTK. Kegiatan tersebut baru mulai berjalan sejak

terbitnya dokumen RPTK pada bulan Desember 2007. Dengan demikian sebelumnya (3 tahun sejak 2004) kegiatan yang dilakukan masih bersifat persiapan, seperti pembentukan pengurus LPSTK, Pokmas, PRA, dan penyusunan RPTK. Kegiatan lapangan antara lain identifikasi Pokmas yang ada sejak COREMAP Fase I oleh MD, identifikasi penghasilan nelayan dan pelatihan untuk pengurus dan MD. Kegiatan-kegiatan COREMAP Fase II di Namangkewa adalah :

1. Kegiatan yang mendasarkan dana dari COREMAP Fase II antara lain adalah dari *Village Grant*. Dana tersebut diberikan Desa Nawangkewa untuk kegiatan pembangunan bak penampungan air bersih dan pipanisasi di Dusun Napungseda. Biaya yang disediakan sebesar RP.75.000.000,- dan swadaya masyarakat sebesar Rp.11.500.000,-. Peletakan batu pertama pembangunan bak penampungan dilaksanakan pada bulan Januari 2008 dan sampai kajian ini dilakukan (pertengahan tahun 2009) pipanisasi belum dapat terselesaikan seluruhnya. Pembangunan bak penampungan di wilayah Dusun Napungseda dianggap kurang tepat oleh sebagian masyarakat desa, karena air bersih tidak dapat menjangkau dusun lain yang juga membutuhkan terutama dusun yang terletak di tepi pantai.

2. Kegiatan COREMAP Fase II juga membangun Pondok Informasi di Desa Nawangkewa. Biaya yang diberikan sebesar Rp.10.000.000,-. Pada kesepakatan pertama dengan masyarakat Pondok Informasi akan dibangun dengan merehabilitasi Pos Keamanan Laut (KAMLA), dan menambah WC dan sumur. Sehubungan adanya bencana ombak besar beberapa tahun yang lalu kantor KAMLA tersebut mengalami rusak berat. Kemudian Pondok Informasi dialihkan ke lokasi yang agak jauh dari pantai dengan merehabilitasi bekas Kantor BPD. Kondisi Pondok Informasi belum dilengkapi dengan buku-buku dan poster-poster karena rehabilitasi baru saja selesai. Dengan demikian Pondok Informasi belum berfungsi.

   Kegiatan UEP di Desa Namangkewa memang ada, yaitu kios dan CU (*Credit Union*) tetapi ini merupakan kegiatan yang dirintis

masyarakat sendiri. Kegiatan koperasi yang dibentuk oleh program COREMAP Fase II belum ada. CU di Desa Namangkewa tersebut berkembang baik sebab dapat menolong para anggotanya yang memerlukan pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari atau anak sekolah.

3. Kegiatan Pokmaswas untuk pengawasan laut belum berjalan karena peralatan (seperti armada kapal dan radio panggil) belum ada. Pos KAMLA (sudah rusak) dan armada kapal laut merupakan warisan program COREMAP Fase I juga sudah rusak. Selama COREMAP Fase II, ini belum ada penggantian fasilitas untuk pengawasan laut.

Dari pembahasan tersebut di atas, maka program dan implementasi kegiatan COREMAP Fase II dapat disimpulkan seperti dalam matriks berikut :

Tabel 1.1 : Matriks Implementasi Program COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa, Kabupaten Sikka Sampai Mei 2009*)

Indikator		Desa	
		Kojadoi	Namangkewa
(1)		(2)	(3)
LPSTK		Dibentuk November 2006	Dibentuk Januari 2006
RPTK		Disusun November 2007 Kegiatan sosialisasi Desember 2007	Disusun November 2007 Kegiatan sosialisasi Desember 2007
Pokmas	Konservasi	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada, menunggu sarana transportasi & dana operasional	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada, menunggu sarana transportasi & dana operasional
	Usaha Ekonomi Produktif (UEP)	Pokmas UEP sudah terbentuk, tahun 2009 LKM telah dibentuk juga, tetapi kegiatan belum ada karena dana bergulir untuk penguatan modal sudah dicairkan (Rp 50 kuta), tapi ditarik kembali	PokmasUEP sudah terbentuk, LKM sudah terbentuk, dana bergulir untuk penguatan modal (Rp 50 juta) sudah dicairkan & distribusikan ke anggota Pokmas pada bulan Mei 2009. Namun

		dimasukkan bank , sebab LKM & masyarakat belum siap. Sampai pertengahan tahun 2009, dana bergilir belum didistribusikan ke masyarakat	baru dapat memberikan pinjaman untuk 29 orang anggota dari lebih 200 anggota. Jumlah pinjaman tiap anggota kecil. Belum mencapai 1 bulan , dampak terhadap pendapatan rumah tangga belum bisa dilihat.
	Wanita/ Jender	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada	Sudah terbentuk, tetapi kegiatan belum ada
	Pengawasan	▪ Sudah terbentuk, dan telah dibekali dengan pelatihan Sismaswas (Sistem Pengawasan Masyarakat) ▪ Kegiatan pengawasan masih terbatas dan dilakukan secara mandiri, karena sarana operasional (perahu motor dan radio komunikasi belum ada)	▪ Sudah terbentuk, dan telah dibekali dengan pelatihan Sismaswas (Sistem Pengawasan Masyarakat) ▪ Kegiatan pengawasan masih terbatas dan dilakukan secara mandiri, karena sarana operasional (perahu motor dan radio komunikasi belum ada)
	Rumput Laut	▪ Sudah terbentuk dan pernah mendapatkan berbagai pelatihan sejak COREMAP Fase I	▪ Tidak ada
Program/ Kegiatan	Fisik	▪ Dana *village grant* tahun anggaran 2007 digunakan untuk pengadaan sarana mesin listrik dan perahu motor (Dusun Koja Besar), fasilitas MCK (Dusun Margajong) dan pipanisasi air bersih (Dusun Kojadoi)	▪ Dana *village grant* tahun anggaran 2007 digunakan untuk pembangunan penampungan air dan pipanisasi di Dusun Napungseda
	Pondok Informasi	▪ Pondok informasi dibangun awal 2008	▪ Pondok informasi dibangun awal 2008

		dan sudah dilengkapi dengan pengadaan buku-buku, tetapi belum dilengkapi sarana pendukung (lemari dan ATK)	dan sudah dilengkapi dengan pengadaan buku-buku, tetapi belum dilengkapi sarana pendukung (lemari dan ATK)

Catatan : - Dalam penyusunan RPTK di Kojadoi dilakukan tgl 12-13 Januari 2007 dan 16 April 2007 dan di Namangkewa tgl 29 Maret 2007 dan 16 November 2007 dengan menggunakan metode PRA.

*) laporan implementasi program COREMAP sampai akhir Mei 2009 (sampai saat penelitian dilakukan)

Pada akhir tahun 2008 telah terbentuk LPSTK, Pokmas dan penyusunan RPTK di Kojadoi maupun Namangkewa. Kegiatan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui usaha produktif dengan bantuan *seed fund* (dana bergulir) dengan membentuk LKM (Lembaga Keuangan Mikro) dengan mendirikan kelompok usaha produktif. Desa Kojadoi sampai sekarang belum menerima *seed fund,* untuk usaha produktif karena terjadi masalah dalam membentuk kelompok usaha produktif. Masyarakat belum sepakat mengenai tempat kegiatan dilakukan. Apakah akan dilakukan di Dusun Kojadoi atau Koja Besar. Masyarakat Koja Besar berpendapat bahwa Kojadoi telah mendapatkan kesempatan pada COREMAP Fase I. Kerancuan ini disebabkan karena antar LPSTK, LKM dan Motivator Desa tidak kompak. Sementara Fasilitator Desa dan Koordinator Fasilitator tidak mampu memberikan bimbingan teknis. Sebagai akibat dari kerancuan ini, maka dana bergulir yang telah ada untuk sementara ditahan oleh pihak COREMAP. Dengan demikian sampai saat ini (2009) di Desa Kojadoi belum ada kegiatan UEP. Berbeda dengan Desa Namangkewa dana bergulir telah dicairkan karena segala persyaratan administrasi telah terpenuhi, antara lain terbentuknya kelompok usaha ekonomi produktif. Pencairan dana telah dilakukan sebanyak 2 tahap pada bulan Mei 2009. Masyarakat yang menerima penguatan modal sebanyak 29 KK.

BAB II

PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI DALAM KEGIATAN COREMAP

Dari berbagai penelitian dan kajian menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang dan biota laut di dalamnya utamanya dikarenakan akibat dari perilaku atau ulah manusia atau masyarakat yang memanfaatkan sumber daya laut. Oleh karena itu, untuk mengembalikan dampak kerusakan-kerusakan sumber daya laut tersebut, perlu memberdayakan masyarakat pesisir untuk lebih memahami dan untuk peningkatan kesejahteraannya. Dengan demikian perlu merubah perilaku masyarakat pesisir yang cenderung merusak sumber daya laut menjadi perilaku yang cenderung melindungi dan melestarikan sumber daya laut. Pemberdayaan perlu dilakukan dengan cara peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan sumber daya laut dan peningkatan partisipasi/keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya laut yang lestari. Aktivitas ini diharapkan di masa mendatang akan bermanfaat bagi usaha dan kelestarian bagi sumber kehidupannya dan kesejahteraannya. Dalam hal ini akan menciptakan kemandirian penduduk pesisir dalam pengelolaan sumber daya laut atau pengelolaan berbasis masyarakat.

2.1. Pengetahuan Dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut

2.1.1. Pengetahuan pengelolaan SDL Desa Kojadoi

Hasil kajian menunjukkan bahwa penduduk Desa Kojadoi umumnya telah mengetahui adanya pengelolaan sumber daya laut. Hal ini tercermin dari hampir seluruh penduduk sampel/responden melaporkan bahwa telah mengetahui tentang program penyelamatan sumber daya laut. Selanjutnya juga tercermin pada pengetahuan mereka tentang adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang, sebagian besar penduduk (98 persen) mengatakan mengetahuinya. Dalam proporsi yang sangat kecil (hanya 2 persen) yang masih mengaku belum mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang tersebut (Tabel 2.1). Bagi mereka yang belum mengetahui kegiatan penyelamatan terumbu karang tersebut, setelah ditelusuri ternyata adalah mereka yang sudah berusia lanjut (di atas 70 tahun) dan berjenis kelamin perempuan. Hal tersebut wajar jika tidak mengetahui, atau ragu dalam menjawab tentang kegiatan penyelamatan terumbu karang di desanya. Hal ini mengingat mereka tidak pernah mengetahui atau melakukan kegiatan yang berkaitan baik langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan pengelolaan sumber daya laut.

Banyaknya penduduk yang mengetahui tentang pengelolaan sumber daya laut tersebut disebabkan program COREMAP telah lama (hampir dua fase) masuk ke Desa Kojadoi. Pemukiman penduduk desa yang mengelompok telah memudahkan arus informasi tentang program pengelolaan sumber daya laut di antara penduduk Desa Kojadoi. Mereka saling mengenal satu dengan yang lain, saling komunikasi setiap hari bahkan setiap saat. Kemudian ditambah bahwa mereka memiliki kegiatan ekonomi yang hampir sama. Mayoritas penduduk desa ini memiliki mata pencaharian utama sebagai nelayan budi daya rumput laut. Usaha tersebut mendapatkan binaan dari program COREMAP. Meskipun juga ada sebagian penduduk yang masih memiliki kegiatan menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan lauk rumah tangga sendiri. Namun pada penelitian pertengahan tahun 2009 yang lalu menunjukkan bahwa pekerjaan menangkap ikan sudah mulai bertambah, semenjak

usaha budi daya rumput laut untuk sementara tidak dapat diharapkan. Kegiatan sebagian penduduk yang lain bertani untuk sekedar penambah pendapatan atau untuk memenuhi kebutuhan sayuran atau bahan makanan (seperti ubi kayu dan jagung) untuk rumah tangga sendiri.

Tabel 2.1: Pengetahuan Responden Tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Desa Kojadoi, 2008

Pengetahuan	Persen
(1)	(2)
1. **Mengetahui adanya pengelolaan sumber daya laut :**	
• Ya	100,0
• Tidak	0,0
Jumlah	100,0
(N)	(100)
2. **Mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang :**	
• Ya	98,0
• Tidak	2,0
Jumlah	100,0
(N)	(100)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Tingkat pendidikan mayoritas penduduk masih rendah, tetapi penduduk di Kojadoi memiliki pengetahuan tentang laut dan keterampilan pada kegiatan di laut yang cukup baik. Ini berarti bahwa penduduk desa ini memiliki pengetahuan tentang kehidupan laut (biota laut) dengan cara mengetahui secara alamiah. Karena dalam program COREMAP Fase I telah dikembangkan usaha budi daya rumput laut, maka mereka umumnya telah mengerti program COREMAP tersebut. Bahkan sebagian besar telah terlibat dalam kegiatan atau sebagai anggota suatu kelompok kegiatan (Pokmas) yang mendapat binaan dan bantuan dari COREMAP. Meskipun keadaannya sekarang menjadi tidak

jelas karena ada unsur dinamika politik perdesaan tentang persoalan dana bergulir dan juga budi daya rumput laut. Budi daya rumput laut yang kurang menunjukkan keberhasilan karena rusak akibat penggunaan pupuk yang tidak ramah lingkungan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Desa Kojadoi sendiri.

2.1.2. Pengetahuan pengelolaan SDL Desa Namangkewa

Program pengelolaan sumber daya laut di Desa Namangkewa juga telah dimulai sejak tahun 2000/2001 atas bantuan Aus-AID. Oleh karena itu, program ini telah dikenal oleh sebagian masyarakat desa ini. Pengetahuan tentang sumber daya laut tidak lepas dari peran para fasilitator, motivator dan pengurus program lainnya termasuk perangkat desa yang secara aktif ikut mensosialisasikan ke program pengelolaan sumber daya laut kepada penduduk desa. Namun pemahaman itu belum bisa menyeluruh kepada semua warga, kemungkinan karena terkait dengan hanya sebagian kecil wilayah Desa Namangkewa yang dapat diklasifikasikan wilayah pantai. Sebab lain karena juga jumlah penduduk yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut hanya kurang dari 20 persen dari seluruh rumah tangga di desa ini. Sebagian besar penduduk Desa Namangkewa adalah bukan nelayan atau yang terkait dengan biota laut, sehingga mereka tidak menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya laut. Oleh karena itu, wajar banyak penduduk yang belum mengenal tentang pengelolaan sumber daya laut dan penyelamatan terumbu karang. Dalam kajian sebelum ini menunjukkan bahwa ada sekitar 28 persen penduduk sampel yang belum mengetahui tentang pengelolaan sumber daya laut (Tabel 2.2). Kemudian hampir 40 persen tidak mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang.

Tabel 2.2 : Pengetahuan Responden Tentang Pengelolaan Sumber Daya Laut, Desa Namangkewa, 2008

Pengetahuan	Persen
(1)	(2)
1. Mengetahui adanya Pengelolaan Sumber Daya Laut :	
• Ya	72,0
• Tidak	28,0
Jumlah	100,0
(N)	(100)
2. Mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang :	
• Ya	58,0
• Tidak	42,0
Jumlah	100,0
(N)	(100)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

2.2. PENGETAHUAN DAN PARTISIPASI PENDUDUK DALAM KEGIATAN COREMAP

2.2.1. Pengetahuan dan partisipasi penduduk dalam kegiatan COREMAP Desa Kojadoi

(1). Pelestarian Terumbu Karang

Bagaimana pengetahuan dan partisipasi penduduk Desa Kojadoi dalam kegiatan-kegiatan pelestarian terumbu karang di desanya? Sebagian besar penduduk sampel (96 persen) di Desa Kojadoi melaporkan telah mengetahui adanya kegiatan peningkatan dan kesadaran tentang pentingnya pelestarian terumbu karang. Dari sejumlah

penduduk sampel yang telah mengetahui tersebut, sekitar 68 persen yang ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Kemudian ada sekitar 32 persen yang mengaku mengetahui, tapi tidak pernah ikut/ berpartisipasi dalam kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya pelestarian terumbu karang, karena ada berbagai alasan antara lain kegiatan mata pencaharian mereka tidak berkaitan langsung dengan pemanfaatan sumber daya laut, usia lanjut sudah tidak aktif bekerja lagi, sakit-sakitan dan lain-lainl. Apabila alasan tidak terlibatnya mereka karena hal-hal tersebut tidak perlu dikawatirkan. Mereka tidak akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mengancam pelestarian terumbu karang. Namun yang perlu diantisipasi sekarang terkait dengan masalah kegagalan para nelayan Desa Kojadoi dalam usaha budi daya rumput laut akhir-akhir ini. Dalam hal ini para nelayan akan cenderung untuk kembali sebagai nelayan tangkap ikan. Apabila pengetahuan dan kesadaran masyarakat nelayan terhadap pelestarian terumbu karang dan biota laut di dalamnya tidak terus menerus disosialisasikan, mereka dimungkinkan akan kembali melakukan kegiatan memanfaatkan sumber daya laut yang mengancam kelangsungan terumbu karang dan biota di dalamnya.

Dalam kaitannya dengan kegiatan perlindungan/ pengawasan pesisir dan laut, ada sebagian besar penduduk sampel (sekitar 95 persen) di Desa Kojadoi mengetahui adanya kegiatan tersebut. Ada sekitar 63 persen mereka yang melaporkan telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Dengan melihat proporsi mereka yang berpartisipasi, mengindikasikan suatu gambaran yang cukup bagus dan positif. Dalam hal ini berarti di Desa Kojadoi berangsur-angsur telah terjadi perubahan perilaku penduduk yang mengarah ke perlindungan terhadap sumber daya laut. Ini berarti sebagian besar dari masyarakat desa kajian telah ikut dalam kegiatan usaha perlindungan/ pengawasan pesisir dan laut. Hal ini penting mengingat perlindungan dan pengawasan pesisir dan laut harus menjadi tanggung jawab bersama, terutama bagi masyarakat pesisir/ pulau yang kehidupannya sangat tergantung pada sumber daya laut. Namun demikian potensi masyarakat untuk tidak peduli terhadap perlindungan biota laut termasuk kelestarian terumbu karang dapat saja

muncul. Hal ini jika menengok sejarah kenelayanan di Kojadoi sebelum program COREMAP masuk desa ini. Sebagian masyarakat desa ini adalah sebagai nelayan yang hidup dari usaha penangkapan ikan yang pernah menggunakan alat tangkap yang kurang ramah terhadap lingkungan. Hal ini akan berpotensi muncul kembali karena tekanan kehidupan rumah tangga nelayan sebagai dampak kegagalan usaha budi daya rumput laut seperti tahun terakhir.

(2). Kelembagaan

Bagaimana pengetahuan dan partisipasi penduduk dalam pembentukan kelembagaan COREMAP di Desa Kojadoi? Dalam rangka kegiatan pembentukan LPSTK Desa Kojadoi yang lalu, ternyata tidak semua penduduk sampel di desa ini mengetahuinya. Hanya sekitar 71 persen yang mengetahui adanya kegiatan tersebut. Dari sejumlah penduduk yang mengetahui adanya kegiatan pembentukan LPSTK tersebut ternyata hanya sekitar 41 persen yang terlibat dalam kegiatan pembentukan. Ini berarti ada sekitar 59 persen atau hampir dua per tiga penduduk merasa tidak pernah terlibat atau ikut serta dalam pembentukan LPSTK. Penduduk yang tidak terlibat dalam pembentukan LPSTK tersebut disebabkan memang mereka tergolong yang tidak diundang. Alasan lainnya mereka diundang, tapi tidak dapat hadir dalam kegiatan tersebut karena alasan-alasan tertentu.

Sedangkan pada tahun-tahun terakhir ini pembentukan kelembagaan sangat terkait dengan program dana bergulir. Para pengurusnya sudah mengalami perubahan. Beberapa pengurus dari tingkat motivator hingga pengurus lainnya kebanyakan ditunjuk dari antara warga Dusun Kojagete (Koja Besar). Sedangkan pengurus lama (COREMAP Fase I) termasuk fasilitator lama tidak lagi mendapat peran. Banyak warga masyarakat terutama di Dusun Kojadoi yang belum mengetahui adanya pengurus baru. Meskipun menurut penelitian terakhir (2009) ada tokoh di Dusun Kojadoi yang telah ditunjuk sebagai ketua Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Desa Kojadoi.

Ilustrasi di atas adalah salah satu perkembangan kondisi kelembagaan yang sedang terjadi di Desa Kojadoi. Banyak persoalan yang ada dalam kelembagaan sekarang ini, yakni dari masalah ketika penunjukan pengurus, masalah pengurus jarang ada di tempat (di Desa Kojadoi) dan masalah pengurus tidak aktif. Hal ini belum ditambah dengan persoalan kecemburuan sosial antar warga antara Dusun Kojadoi dan Koja Besar. Seolah-olah keberhasilan pada program COREMAP I yang lalu lebih banyak dirasakan oleh warga Dusun Kojadoi dibandingkan dengan warga dusun lain. Sebetulnya hal tersebut wajar mengingat sebagian besar penduduk Desa Kojadoi berada di Dusun Kojadoi.

Tabel 2.3 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pembentukan Lembaga Sumber Daya Terumbu Karang, Desa Kojadoi, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya	71,0	40,8
2. Tidak	29,0	59,2
Jumlah	100,0	100,0
(N)	(100)	(71)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

(3). Pelatihan

Dalam kegiatan pelatihan untuk usaha ekonomi produktif (UEP) ada 71 persen responden yang mengaku mengetahuinya. Namun hanya kurang dari separohnya (49 persen) yang berpartisipasi dalam kegiatan pelatihan. Hal tersebut mungkin hanya anggota masyarakat terpilih atau memenuhi persyaratan tertentu yang dapat diikutkan, antara lain mereka yang ingin memiliki usaha ekonomi produktif dan relatif masih muda. Mereka diasumsikan lebih responsif terhadap pelatihan yang diberikan oleh instruktur.

Perkembangan sekarang (pertengahan tahun 2009) menunjukkan bahwa kegiatan koperasi (Koperasi Koja Jaya) hasil kelanjutan COREMAP Fase I masih berjalan, meskipun kinerjanya masih jauh dari maksimal. Hal ini juga disebabkan oleh banyak penduduk yang tidak lagi memiliki usaha budi daya rumput laut di wilayah Kojadoi. Pengalaman tahun-tahun sebelumnya (sebelum tahun 2008) hasil panen rumput laut para nelayan Desa Kojadoi biasanya dijual lewat Koperasi Koja Jaya. Dalam kepengurusan COREMAP yang baru (Fase II) nampaknya tidak mau memanfaatkan peran koperasi untuk penyaluran/ distribusi dana bergulir. Sebagian masyarakat terutama dari Dusun Koja Besar beranggapan bahwa Koperasi Koja Jaya adalah milik warga Dusun Kojadoi saja. Dalam program COREMAP II warga Dusun Koja Besar mengharapkan/ menuntut perlunya membuka koperasi sendiri, sehingga pengelolaan dana bergulir bisa dilakukan lewat koperasi yang baru. Namun hal tersebut melanggar peraturan bahwa dalam satu desa tidak diperbolehkan ada lebih dari satu koperasi. Oleh karena itu, penyaluran dana bergulir untuk COREMAP Fase II menjadi terhambat, karena dianggap bahwa masyarakat belum siap menerima.

Tabel 2.4 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pelatihan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya	71,0	49,3
2. Tidak	29,0	50,7
Jumlah	100,0	100,0
(N)	(100)	(71)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

(4). Pendampingan UEP

Sementara kegiatan pendampingan untuk kegiatan UEP, ternyata hanya 60 persen responden yang mengatakan mengetahuinya. Mungkin hanya mereka yang menjadi pendamping dan yang merasa

mendapatkan pendampingan yang mengetahuinya. Dari sejumlah responden yang mengetahui adanya pendampingan tersebut sekitar 58 persen yang pernah berpartisipasi dalam kegiatan. Sebagian dari mereka kemungkinan para responden yang pernah berperan dalam pendampingan dalam kegiatan UEP dan responden anggota UEP yang pernah merasa didampingi.

Bagaimana dengan kegiatan penyusunan rencana pemanfaatan dan pelestarian terumbu karang (RPTK)? Ada sekitar 63 persen responden di Desa Kojadoi yang mengetahui adanya kegiatan penyusunan RPTK tersebut. Dari sejumlah responden yang mengetahui adanya kegiatan tersebut, hanya 51 persen yang mengaku pernah terlibat dalam kegiatan tersebut. Mereka adalah para pengurus yang terlibat kegiatan COREMAP, pengurus dan anggota Pokmas serta para aparat desa yang diundang dan hadir dalam pertemuan-pertemuan yang berkaitan dengan penyusunan RPTK.

Dalam perkembangannya akhir-akhir ini kegiatan pendampingan dalam kegiatan UEP di Desa Kojadoi belum berjalan. Hal tersebut disebabkan masih adanya persoalan kelembagaan dan masalah kehidupan masyarakat seperti telah disebutkan sebelumnya. Sulit bagi peneliti untuk menelusuri apakah pendampingan saat ini telah dilakukan atau belum. Hal ini karena kepengurusan di desa ini belum memiliki kegiatan pendampingan kegiatan UEP, mereka masih perlu menunggu kapan dana bergulir akan didistribusikan.

Tabel 2.5 : Pengetahuan dan Partisipasi Responden Tentang Pendampingan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya	60,0	58,0
2. Tidak	40,0	42,0
Jumlah	100,0	100,0
(N)	(100)	(71)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

(5). Kegiatan UEP

Kemudian bagaimana tentang pengetahuan dan partisipasi responden di Desa Kojadoi dalam kegiatan Pokmas (kelompok masyarakat)? Secara umum sebagian besar responden mengetahui adanya kegiatan Pokmas di desanya, terutama Pokmas UEP, Pokmas Perempuan/Jender dan Pokmas Konservasi. Namun mereka yang terlibat dalam kegiatan Pokmas tersebut umumnya masih belum banyak.

Di antara beberapa Pokmas tersebut nampaknya yang paling populer adalah kegiatan Pokmas Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan ini yang paling banyak diketahui oleh para responden (82 persen). Kemungkinan kegiatan Pokmas ini yang paling memberi manfaat langsung untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga. Di antara Pokmas yang lain Pokmas UEP ini paling banyak anggota masyarakat yang terlibat. Dari 82 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan Pokmas UEP, ternyata 61 persen pernah terlibat dalam kegiatan. Hal ini sangat wajar karena tujuan utama kegiatan COREMAP adalah untuk meningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat kepulauan atau masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumber daya laut. Namun sayang sampai pertengahan tahun 2009 kegiatan Pokmas UEP sedang terhenti. Seperti telah diungkapkan di atas kegiatan ekonomi utama penduduk Desa Kojadoi (usaha budi daya rumput laut) sedang terhenti. Kondisi ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha lainnya, seperti usaha warungan rokok, makanan/ minuman atau kedai sembako. Dalam kegiatan koperasi yang ada juga terpengaruh, ada sejumlah warga yang menunda-nunda pengembalian uang pinjaman untuk modal usaha karena penghasilan rumah tangga sedang mengalami penurunan.

Tabel 2.6 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Kegiatan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya 2. Tidak	82,0 18,0	61,0 39,0
Jumlah (N)	100,0 (100)	100,0 (82)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Kegiatan Pokmas yang juga masih cukup dikenal responden adalah Pokmas Perempuan/Jender. Ada sekitar 66 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan Pokmas Perempuan. Sesuai dengan namanya kelompok ini khusus untuk kegiatan usaha para perempuan/ ibu-ibu. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan Pokmas ini di Desa Kojadoi? Hanya sekitar 30 persen dari responden yang mengaku mengetahui tersebut yang anggota rumah tangganya/isterinya ikut serta dalam Pokmas Perempuan/Jender, sebab jumlah anggota Pokmas ini sangat terbatas terutama pada para perempuan yang telah memiliki usaha di desanya.

Bagaimana dengan kegiatan Pokmas Konservasi? Ada sekitar 62 persen reponden ternyata telah mengetahui adanya kegiatan Pokmas Konservasi. Indikasi yang cukup baik bahwa sosialisasi tentang Pokmas Konservasi sudah meluas, meskipun belum 100 persen. Namun dari mereka yang mengetahui hanya sekitar 34 persen yang mengaku terlibat. Hal ini wajar sebab anggota Pokmas Konservasi tidak memerlukan anggota masyarakat yang banyak seperti Pokmas UEP. Namun Pokmas ini penting dan perlu ditingkatkan masyarakat yang terlibat untuk

menjaga pelestarian sumber daya laut dan keberlangsungan pendapatan masyarakat dari sumber daya laut.

Pokmas lainnya adalah Pokmaswas, Koperasi dan Lembaga Keuangan Mikro. Namun masih sedikit dikenal oleh reponden dan masih sedikit yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Khusus untuk koperasi di Kojadoi telah ada Koperasi Serba Usaha (KSU) yang dibentuk sejak COREMAP Fase I. Kegiatannya meliputi simpan pinjam, membuka toko dan membeli hasil rumput laut. Anehnya banyak responden mengaku tidak mengetahui apa kegiatannya. Sebagai petunjuk kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Desa Kojadoi secara umum agar mereka dapat ikut memanfaatkan peran koperasi yang ada di desanya.

(6). Kegiatan Village Grant

Seperti telah diungkapkan dalam bab di atas bahwa di Desa Kojadoi pada tahun anggaran 2007/2008 telah menerima dana *village grant* untuk pembangunan fisik. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan fisik di Desa Kojadoi berupa pembangunan MCK, pembuatan pondok informasi dan pipanisasi. Partisipasi mereka pada umumnya berupa tenaga kerja. Masyarakat yang dipilih umumnya hanya masyarakat yang mengerti tentang bangunan sesuai dengan bangunan fisik yang akan dibuat. Hal lain karena pipanisasi dianggap sebagai kebutuhan warga dan hasilnya dapat ndirasakan.

2.2.2. Pengetahuan dan partisipasi penduduk dalam kegiatan COREMAP Desa Namangkewa

(1) Pengetahuan terumbu karang

Dalam kajian ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk sampel (72 persen) di Desa Namangkewa telah mengetahui adanya program COREMAP. Namun hampir sepertiga penduduk sampel di desa ini belum mengetahui adanya program COREMAP. Hal ini disebabkan tidak semua penduduk menggantungkan hidupnya dari sumber daya laut

dan menerima sosialisasi program. Variasi lapangan pekerjaan di desa ini juga mencerminkan kehidupan masyarakat tidak semua menggantungkan pada pemanfaatan sumber daya laut. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ternyata hanya sekitar 58 persen penduduk sampel yang mengetahui terhadap kegiatan penyelamatan terumbu karang. Ini berarti hampir separoh (42 persen) dari mereka tidak mengetahui adanya kegiatan penyelamatan terumbu karang.

Pengetahuan dan keterlibatan penduduk Desa Namangkewa dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan COREMAP masih rendah. Dari kegiatan-kegiatan yang pernah dilakukan oleh COREMAP tidak mencapai angka 50 persen dari jumlah responden yang mengetahui dan yang terlibat dalam kegiatan. Penjelasannya seperti di atas karena sebagian besar penduduk bekerja di luar yang terkait dengan pemanfaatan sumber daya laut. Mereka merasa tidak memerlukan informasi dan pengetahuan yang terkait dengan COREMAP.

Di antara kegiatan-kegiatan tersebut persentase tertinggi adalah kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya pelestarian terumbu karang (49 persen). Sebaliknya lebih dari separoh (51 persen) ternyata tidak pernah mengetahui bahwa ada kegiatan peningkatan pengetahuan dan kesadaran pentingnya terumbu karang di desanya selama ini. Dari mereka yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut sebagian besar (61,2 persen) ternyata telah terlibat dalam kegiatan.

Kemudian adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir/ laut, hanya 38 persen penduduk yang melaporkan mengetahuinya. Ini berarti sebagian besar dari mereka (62 persen) tidak pernah mengetahui adanya kegiatan perlindungan/ pengawasan pesisir/laut. Dari mereka yang mengaku mengetahui adanya kegiatan perlindungan/pengawasan pesisir/laut tersebut hanya 55,3 persen yang pernah terlibat dalam kegiatan. Mereka kemungkinan memang betul-betul nelayan yang peduli terhadap sumber daya laut dan kemungkinan lain anggota Pokmas yang mendapat tugas terhadap pengamanan laut (Pokmaswas).

Sebetulnya kondisi daratan dan kepulauan agak berbeda. Di kepulauan sebagian besar penduduk kehidupannya terkait langsung dengan lingkungan laut. Hal ini mau tidak mau mereka secara langsung bersinggungan dengan ekologi laut. Berbeda dengan di daratan (Desa Namangkewa) panjang pantainya saja tidak lebih dari 2 kilometer. Sedangkan penduduknya yang terlibat tidak lebih dari 20 KK, oleh karena itu pengetahuan yang terkait dengan masalah terumbu karang juga tidak banyak.

(2). Kelembagaan

Dalam kegiatan pembentukan LPSTK, ternyata hanya sebagian kecil penduduk (23 persen) yang mengetahui. Ini berarti mayoritas dari (77 persen) tidak mengetahui adanya kegiatan pembentukan LPSTK. Dari mereka yang mengetahui adanya pembentukan LTSTK tersebut ternyata hanya 56,5 persen yang terlibat dalam kegiatan. Kemungkinan mereka yang diundang dan hadir dalam pertemuan-pertemuan dalam rangka pembentukan LPSTK. Kemungkinan besar mereka-mereka itu adalah anggota pengurus LPSTK dan anggota Pokmas yang aktif atau biasa diundang pertemuan dalam kegiatan di desa. Di samping mereka pengurus juga termasuk anggota staf pamung desa serta aktivis desa lainnya. Sebagai contoh anggota karang taruna sering terlibat dalam kegiatan kelembagaan lainnya.

Tabel 2.7 : Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pembentukan Lembaga Pengelola Sumber Daya Terumbu Karang, Desa Namangkewa, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya	23,0	56,5
2. Tidak	77,0	43,5
Jumlah	100,0	100,0
(N)	(100)	(23)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka: Hasil BME, 2008

(3). Pelatihan

Dalam kegiatan pelatihan untuk usaha ekonomi produktif (UEP), hanya 19 persen responden yang mengetahuinya. Namun sebagian besar (73,7 persen) dari yang mengetahui tersebut ternyata mereka yang terlibat dalam kegiatan pelatihan. Mereka yang terlibat tersebut dapat dipastikan adalah para anggota Pokmas UEP yang memang pernah mendapatkan pelatihan untuk UEP pada program COREMAP fase I. Kemudian dalam kegiatan pendampingan untuk UEP, hanya 11 persen responden yang mengetahui adanya kegiatan tersebut. Sementara yang terlibat dalam kegiatan pendampingan mencapai 63,6 persen.

Gambaran di atas dapat dikatakan bahwa kegiatan pelatihan terkait dengan program COREMAP cukup baik. Hal ini disebabkan karena faktor kelembagaan yang mempengaruhi terutama kelembagaan di Desa Namangkewa tetap berjalan. Ini juga dikarenakan oleh faktor kesadaran dan keaktifan para pengurusnya.

Tabel 2.8: Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Pelatihan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya	19,0	73,7
2. Tidak	81,0	26,3
Jumlah	100,0	100,0
(N)	(100)	(19)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

Dalam kegiatan penyusunan RPTK hanya 15 persen responden yang mengaku mengetahui kegiatan tersebut. Sebagian besar dari mereka (73,3 persen) terlibat dalam kegiatan, dapat dipastikan mereka adalah para pengurus LPSTK dan para pengurus Pokmas yang diundang dalam pertemuan dalam kegiatan penyusunan RPTK. Di samping itu,

seperti juga telah disebutkan mereka bisa staff kelurahan atau aktivis desa.

(4). Kegiatan UEP

Bagaimana dengan pengetahuan dan keterlibatan yang terkait dengan kegiatan Pokmas? Kegiatan Pokmas di desa Namangkewa yang teridentifikasi dalam survei hanya 3 Pokmas, yaitu Pokmas UEP, Pokmas Perempuan dan Pokmas Konservasi. Dari hasil kajian menunjukkan bahwa ternyata hanya sebagian kecil responden yang mengetahui adanya kegiatan Pokmas-Pokmas di Desa Namangkewa. Untuk kegiatan Pokmas UEP hanya 15 persen responden yang mengetahui (Diagram 3.3a). Dari mereka tersebut hanya 46,7 persen yang terlibat atau ikut serta dalam kegiatan Pokmas tersebut. Jadi sebagian besar responden selama ini tidak pernah mengetahui adanya kegiatan Pokmas UEP. Dalam kegiatan Pokmas Perempuan, ada sekitar 15 persen yang mengetahuinya. Mereka yang ikut serta dalam kegiatan tersebut hanya 46,7 persen. Mereka adalah para anggota Pokmas Perempuan yang membutuhkan pembinaan dari COREMAP. Selanjutnya dalam kegiatan Pokmas Konservasi, hanya dalam proporsi paling kecil (10 persen) yang mengatakan mengetahui kegiatan tersebut. Separoh dari mereka pernah ikut serta dalam kegiatan Pokmas Konservasi, dapat dipastikan mereka anggota Pokmas Konservasi yang terkena sampel.

Pada perkembangan terakhir (pertengahan 2009) kegiatan UEP di desa Namangkewa kegiatan distribusi dana bergulir baru dimulai pada bulan Mei 2009. Perguliran tersebut belum mencapai satu bulan ketika peneliti mengadakan kajian di desa Namangkewa. Sasaran dana bergulir baru melibatkan 29 orang warga masyarakat, rata-rata jumlahnya hanya sekitar Rp 2 juta dan belum dirasakan keuntungannya. Secara kelembagaan dana ini telah melibatkan pamong desa. Dalam hal ini pamong desa ikut bertanggung jawab terhadap kelancaran dana bergulir dan keberhasilan program.

Tabel 2.9: Pengetahuan dan Keterlibatan Responden Tentang Kegiatan Untuk UEP, Desa Kojadoi, 2008

Keterangan	Pengetahuan (Persen)	Keterlibatan (Persen)
(1)	(2)	(3)
1. Ya	15,0	46,7
2. Tidak	85,0	53,3
Jumlah	100,0	100,0
(N)	(100)	(15)

Sumber : Survei Kondisi Sosek Masyarakat di Lokasi COREMAP II, Kabupaten Sikka : Hasil BME, 2008

(5). Kegiatan Village Grant

Pembangunan fisik dana dari village grant yang digunakan untuk pembuatan bak penampungan air, pipanisasi dan pembuatan Pondok Informasi telah melibatkan partisipasi masyarakat. Dalam hal juga hanya melibatkan jumlah tenaga kerja setempat yang terbatas serta mereka yang memiliki kemampuan sebagai tukang bangunan. Sebab partisipasi masyarakat yang diberikan masyarakat berupa tenaga kerja.

Dalam kajian pertengahan 2009 mengungkapkan bahwa dana *village grant* yang digunakan untuk membangun bak penampungan air bersih dan pengadaan pipanisasi sudah berjalan. Namun belum semua warga di 3 dusun di Desa Namangkewa menikmati, terutama warga yang tinggal di dusun wilayah pesisir (Dusun Namangjawa). Jadi pengadaan pipanisasi perlu terus dilanjutkan agar dapat dinikmati semua penduduk. Untuk melanjutkan pipanisasi ini juga didukung dengan dana dari program lain, termasuk PNPM yang telah digu;irkan.

Dengan demikian program *village grant* yang terkait dengan pembangunan fisik di Desa Namingkewa dapat dikatakan telah berjalan, hanya masih jauh dari memadahi untuk pelayanan air bersih seluruh warga desa. Saat sekarang ini hanya warga di sekitar bak saja yang paling banyak memperoleh distribusi air bersih tersebut. Hal lain yang diperlukan untuk kegiatan lain yang terkait dengan program ini adalah

masalah dana pemeliharaan. Tampaknya para tokoh masyarakat baru desa tersebut sedang membuat konsep-konsep dan pemikiran program yang mengikutkan kemampuan warga di Desa Namingkewa.

BAB III

MANFAAT SOSIAL - EKONOMI KEGIATAN COREMAP

Bagian ini bermaksud mengkaji manfaat sosial dan ekonomi kegiatan COREMAP terutama dalam fase II. Dalam manfaat sosial dikemukakan tentang manfaat yang dirasakan oleh masyarakat desa sasaran selama ini yang tidak terkait langsung terhadap pendapatan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, informasi, lingkungan dsb. Sedangkan manfaat ekonomi dalam kajian di bab ini lebih fokus pada pendapatan masyarakat. Kemudian apakah ada perubahan pendapatan masyarakat selama ada program COREMAP Fase II. Bagaimana kecenderungan perubahan pendapatan masyarakat dari tahun 2006 sampai 2009, yaitu dari saat kajian tahun 2007 sampai tahun 2009. Perubahan yang terjadi dalam arti mengalami peningkatan atau mungkin justru mengalami penurunan, juga untuk mencoba menerangkan tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya perubahan tersebut. Apakah perubahan tersebut dapat dipengaruhi oleh kegiatan program COREMAP, atau mungkin sangat dipengaruhi oleh program lain yang masuk ke dalam desa kajian atau ada faktor-faktor lain lagi yang ikut berpengaruh.

3.1. MANFAAT SOSIAL KEGIATAN COREMAP

3.1.1. Kegiatan *village grant*

- Desa Kojadoi

Di Desa Kojadoi sebagaimana diungkap dalam bab sebelumnya dana *village grant* dalam COREMAP Fase II telah diterima pada tahun 2007/2008. Program ini dikhususkan untuk kegiatan pembangunan fisik. Di Desa Kojadoi antara lain digunakan untuk : (1). Pengadaan dan pemasangan mesin listrik; (2). Pembangunan fasilitas MCK; (3). Pondok informasi; dan (4). Pengadaan perahu motor.

Sebagian program tersebut telah sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Kojadoi. Mesin listrik telah dioperasikan di Dusun Koja Besar, sehingga masyarakat dusun tersebut telah merasakan manfaatnya. Manfaat yang dirasakan dapat digunakan untuk penerangan rumah dalam rumah tangga, meskipun belum mampu memberikan penerangan untuk sepanjang malam. Biasanya listrik tersebut hanya menyala dari pukul 18.00 sampai dengan pukul 22.00. Dengan adanya penerangan tersebut dapat dimanfaatkan untuk penerangan belajar bagi anak-anak dan digunakan untuk menyalakan televisi dan radio. Oleh karena itu, masyarakat di desa ini tidak sampai ketinggalan informasi. Hanya apabila digunakan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rumah tangga belum mampu.

Pembangunan MCK yang dibangun di Dusun Margajong sebanyak 4 unit juga sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dusun tersebut. Program ini dapat menyediakan air bersih dan menyediakan sanitasi. Oleh karena itu, program ini ikut meningkatkan kesehatan masyarakat di Dusun Margajong, Desa Kojadoi.

Pondok informasi telah terbangun pada tahun 2008. Pondok ini telah dilengkapi dengan sarana informasi tentang COREMAP, yakni buku-buku dan poster tentang COREMAP. Juga buku tentang mulok (muatan lokal) untuk siswa SD dan SMP hanya jumlahnya masih terbatas. Namun pondok tersebut telah dapat dimanfaatkan masyarakat

dan khususnya anak-anak sekolah untuk mendapatkan informasi tentang program COREMAP dan kehidupan biota laut.

- Desa Namangkewa

Di Desa Namangkewa dana *village grant* COREMAP Fase II telah digunakan untuk pembangunan bak penampungan air bersih dan pipanisasi untuk mengalirkan air dari bak penampungan ke dusun-dusun dan rumah tangga. Dana tersebut juga digunakan untuk perbaikan pondok informasi.

Program air bersih ini telah dirasakan oleh sebagian masyarakat di Desa Namangkewa, yaitu masyarakat di Dusun Napungseda dan sebagian masyarakat Dusun Namangkewa. Sementara masyarakat Dusun Namangjawa belum menikmatinya. Masyarakat di Dusun Napungseda dan sebagian Namangkewa telah dapat menikmati air bersih untuk keperluan air minum dan cuci serta mandi. Dengan adanya program ini telah ikut meningkatkan pemenuhan kebutuhan rumah tangga tentang air bersih dan sekaligus meningkatkan kesehatan masyarakat.

Mengenai pondok informasi telah selesai diperbaiki. Namun sayang selama ini belum dapat dimanfaatkan, karena belum tersedia sarana-sarana informasinya (meja, kursi, buku-buku dan pamlet tentang COREMAP). Pihak pengurus COREMAP juga belum memanfaatkan bangunan tersebut.

3.1.2. Kegiatan LKM (UEP)

- Desa Kojadoi

Pokmas UEP dan kepengurusan LKM (Lembaga Keuangan Mikro) di Desa Kojadoi pada awal 2009 sudah terbentuk. Dana bergulir juga sudah bisa dicairkan dan distribusikan ke masyarakat. Namun nampaknya berhubung pengurus LKM dan masyarakat belum siap, maka dana bergulir tersebut sementara masih disimpan di bank. Pencairan

tersebut menunggu kesiapan LKM yang merasa belum memiliki pedoman-pedoman yang jelas tentang prosedur pengelolaan dana. Sehubungan sangat kecilnya jumlah dana yang akan digulirkan, masih ada silang pendapat masyarakat dusun mana yang akan mendapat guliran dana dan untuk berapa orang serta syarat-syaratnya bagaimana.

Manfaat lain yang telah dapat dirasakan di Desa Kojadoi dengan adanya program COREMAP selama ini adalah adanya perubahan perilaku masyarakat, terutama masyarakat nelayan. Perilaku yang jelas adanya peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya pelestarian terumbu karang dan biota laut. Mereka sudah tidak mau lagi menggunakan alat tangkap biota laut yang merusak kelestarian terumbu karang dan biota laut, seperti penggunaan bom, potasium dan racun.

- Desa Namangkewa

Di Desa Namangkewa pembentukan Pokmas UEP dan kepengurusan LKM juga telah dibentuk pada awal tahun 2009. Kondisi perkembangan LKM di Desa Namangkewa lebih baik dibandingkan di Desa Kojadoi. Pengurus LKM telah bekerja untuk memberikan pelayanan ke masyarakat. Meskipun dana bergulir hanya 50 juta rupiah, karena inisiatif dan kesigapan pengurus LKM dan didukung Kepala Desa dana tersebut telah digulirkan ke masyarakat/ anggota Pokmas. Namun hanya sebagian kecil anggota Pokmas yang telah menerima pinjaman dana bergulir, yakni baru sekitar 15 persen dari seluruh anggota Pokmas yang telah menikmati pinjaman dana bergulir untuk pengembangan usaha atau penguatan modal usaha kecil. Pada saat kajian dilakukan pada bulan Juni 2009 dana diterima oleh para anggota belum sampai satu bulan, sehingga belum dirasakan pengaruhnya terhadap pendapatan rumah tangga. Namun apabila dana tersebut dikelola dengan baik oleh para pengurus LKM dan didukung kesadaran dari anggota dan adanya pendapingan usaha, perguliran dana akan terus berjalan dan mampu meningkatkan usaha anggota. Hanya sayangnya perguliran dana ini saat ini belum digulirkan ke rumah tangga nelayan.

Saat ini masih diberikan kepada anggota Pokmas yang diharapkan dapat mengembalikan dengan baik.

Di samping manfaat kesehatan, manfaat lain program COREMAP yang telah dapat dirasakan di Desa Namangkewa selama ini adalah adanya perubahan perilaku masyarakat, terutama masyarakat yang hidupnya menggantungkan pada pemanfaatan sumber daya laut. Perubahan perilaku berupa peningkatan kesadaran masyarakat tentang perlunya pelestarian terumbu karang dan biota laut. Umumnya mereka sudah tidak mau lagi menggunakan alat tangkap biota laut yang merusak kelestarian terumbu karang dan biota laut, seperti penggunaan bom, potasium dan racun.

3.2. Manfaat Ekonomi Kegiatan COREMAP

3.2.1. Kecenderungan perubahan pendapatan masyarakat dan faktor berpengaruh

Dalam kajian pendapatan ini pembahasan tidak akan membandingkan antara Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa. Namun akan melihat masing-masing desa sebagai kasus. Oleh karena itu, dalam analisis pendapatan masyarakat akan dipisahkan antara Desa Kojadoi dan Desa Namangkewa

Dalam pembahasan tentang pendapatan masyarakat secara umum dianalisis mengenai pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita. Kemudian juga membahas sektor mana yang mengalami perubahan cukup signifikan dan sektor yang kurang signifikan perubahannya serta faktor-faktor apa yang berpengaruh. Dalam hal ini dianalisis menurut masing-masing sektor. Selanjutnya dalam bagian ini juga dianalisis pendapatan rumah tangga khusus di sektor kenelayanan/ perikanan tangkap. Sektor kenelayanan menjadi fokus utama dalam pembahasan bagian ini.

3.2.1.1. Pendapatan masyarakat Desa Kojadoi

a. Pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Kojadoi

Hasil kajian PPK-LIPI tahun 2008 yang lalu telah mengungkapkan bahwa pendapatan per kapita penduduk Desa Kojadoi antara tahun 2006 sampai tahun 2008 telah mengalami penurunan. Penurunan tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi usaha budi daya rumput laut yang tidak menggembirakan. Tanaman rumput laut terkena hama yang oleh penduduk setempat disebut *hama ais-ais*. Kemudian ditambah lagi dengan makin merebabnya penggunaan pupuk GT (*Green Tonic*) yang untuk sementara menggemukkan batang rumput laut, namun akibat selanjutnya menurunkan kualitas hasil produksi dan mencemarkan lingkungan perairan di Desa Kojadoi dan sekitarnya (Daliyo, Soewartoyo, Sumono, Zainal Fatoni, 2008). Padahal pada tahun-tahun sebelumnya (2005 – 2006) budi daya rumput laut telah menjadi primadona usaha di daerah ini dan telah meningkatkan pendapatan dan memberikan kesempatan kerja bagi penduduk beserta anggota rumah tangganya. Hampir semua anggota rumah tangga memiliki kesibukan dalam membantu usaha budi daya rumput laut. Sehingga penduduk Desa Kojadoi makin mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke sekolah lanjutan atas (Daliyo, Soewartoyo, YB Widodo dan John Haba, 2007).

Pendapatan perkapita penduduk Desa Kojadoi per bulan pada tahun 2006 – 2008 telah mengalami penurunan dari Rp 181.850,- menjadi Rp 180.400,- (Tabel 3.1). Pada tahun 2009 kondisi perekonomian Desa Kojadoi ternyata makin parah dari awal tahun 2009 sampai pertengahan tahun 2009. Usaha budi daya rumput laut sudah betul-betul hancur, tak ada satu rumah tanggapun yang masih mampu mempertahankan usaha tersebut. Kondisi ini sangat memukul kehidupan penduduk Desa Kojadoi yang semula sudah menggantungkan usaha rumput laut. Sampai pertengahan tahun 2009 rata-rata pendapatan per kapita per bulan di desa ini hanya Rp 77.071,-. Jadi dari tahun 2006

sampai pertengahan tahun 2009 telah terjadi penurunan pendapatan per kapita sebesar 53,6 persen. Dari hasil pengamatan menunjukkan kondisi desa tampak sepi, pengangguran makin meningkat. Mereka yang masih muda terpaksa merantau mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan ketrampilannya. Kebanyakan angkatan kerja yang masih muda dan pendidikan rendah, baik laki-laki maupun perempuan menjadi buruh pada usaha budi daya rumput laut di daerah lain, seperti di Adonara, Lembata dan daerah lainnya yang masih aman terhadap hama. Mereka yang memiliki kemampuan/ketrampilam dalam bangunan sebagai buruh di kota-kota di Flores. Ada sebagian anak mudanya yang bekerja di Malaysia, sebagai buruh di perkebunan.

Pendapatan rumah tangga di Desa Kojadoi juga mengalami penurunan yang drastis. Pada tahun 2006 rata-rata pendapatan rumah tangga di desa ini sebesar Rp 756.503 telah turun menjadi Rp 624.245 pada tahun 2008 (Tabel 3.1). Hal ini sebagai akibat pendapatan andalan penduduk Desa Kojadoi dari usaha budi daya rumput laut sudah mengalami kemunduran. Sebagaimana telah dituangkan di atas disebabkan merebabnya hama rumput laut pada waktu itu. Pendapatan rumah tangga sangat turun drastis hanya mencapai Rp 495.105,- akibat pada tahun 2009 usaha rumput laut sudah habis sama sekali. Dari tahun 2006 sampai pertengahan tahun 2009 terjadi penurunan sebesar 23,6 persen/tahun. Banyak angkatan kerja rumah tangga di Desa Kojadoi yang menganggur dan hanya bekerja sebagai buruh di tempat lain. Pada angka median pendapatan rumah tanggapun juga mengalami penurunan drastis, yaitu dari dari Rp 556.250 tahun 2006 jatuh menjadi hanya Rp 245.833,- tahun 2009. Penurunan tersebut ternyata juga terjadi pada pendapatan maksimum rumah tangga, yang menurun drastis dari Rp 6.500.000,- menjadi hanya Rp 3.000.000,- pada tahun 2009.

Tabel 3.1 : Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009

Pendapatan/ Bulan	Jumlah			
	Tahun 2007 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tahun 2009 (dalam Rp)	Perubahan/ tahun (persen) 2006 – 2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Per Kapita	181.850	180.400	77.071	- 53,6
Rata-Rata Rumah Tangga	756.503	624.245	495.105	- 23,6
Median	556.250	438.515	245.833	- 50,4
Minimum Rumah Tangga	113.333	16.250	38.333	- 71,9
Maksimum Rumah Tangga	6.500.000	3.500.000	3.000.000	- 47,2

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2007, 2008 dan 2009

Dilihat dari kelompok pendapatan rumah tangga (Tabel 3.2) kebanyakan rata-rata pendapatan rumah tangga telah bergeser dari pendapatan tinggi dan menengah ke pendapatan yang paling rendah. Kelompok rumah tangga yang pendapatannya sebesar Rp 1.500.000,- ke atas pada tahun 2006 sebanyak 7 persen pada tahun 2009 hanya sebesar satu persen. Kelompok rumah tangga yang pendapatannya antara Rp 1.000.000,- sampai dengan Rp 1.499.000,- pada tahun 2006 mencapai 12 persen, pada tahun 2009 hanya sebesar 3 persen. Penurunan jumlah rumah tangga drastis terjadi pada kelompok pendapatan antara 500.000,- sampai Rp 999.000,-, yaitu dari 42 persen tahun 2006 tiga tahun berikutnya hanya 2 persen. Sebaliknya jumlah rumah tangga pada kelompok pendapatan yang terbawah (< Rp 500.000,-) mengalami kenaikan yang yang cukup signifikan dari 39

persen (tahun 2006) menjadi 94 persen (tahun 2009). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di Desa Kojadoi telah terjadi pemiskinan rumah tangga, sebagai akibat usaha budi daya rumput laut yang menjadi andalan desa mengalami kehancuran. Nampaknya perlu waktu beberapa tahun untuk pemulihan lingkungan yang kondusif untuk tanaman rumput laut. Ada sebagian informan yang mengatakan sudah bisa mulai ditanami lagi rumput laut, namun sebagian besar yang lain mengatakan belum bisa dan belum berani mulai menanam lagi. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan modal awal untuk menyiapkan bibit dan media untuk penanaman. Mereka masih takut gagal, bila gagal berarti harus kehilangan modal. Padahal satu-satunya modal yang mungkin diperoleh adalah dari meminjam lembaga keuangan atau rentenir.

Tabel 3.2 : Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok/Kategori Pendapatan, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab.Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009

Kelompok/Kategori Pendapatan/ Bulan (dalam rupiah)	Frekuensi			
	Tahun 2006 (persen)	Tahun 2008 (persen)	Tahun 2009 (persen)	Perubahan 2006-2009 (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
< 500.000	39,0	57,0	94,0	+ 55
500.000 - 999.000	42,0	27,0	2,0	- 40
1.000.000 - 1.499.000	12,0	10,0	3,0	- 9
1.500.000 ke atas	7,0	6,0	1,0	- 6
Jumlah	100,0	100,0	100,0	
Pendapatan Rata-Rata (Rp)	756.503	624.245	495.105	Turun Rp 261.398

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2007, 2008 dan 2009

b. Pendapatan menurut lapangan kerja di Desa Kojadoi

Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan dilihat menurut sektor/lapangan pekerjaan, ternyata hampir semua mengalami

penurunan, kecuali pada sektor jasa. Di subsektor perikanan tangkap ternyata ikut mengalami penurunan cukup drastis, yaitu dari Rp 638.080,- pada tahun 2006 turun menjadi hanya Rp 257.666,-. Meskipun dibandingkan dengan tahun 2008 ada sedikit kenaikan, karena kondisi yang terpaksa mereka harus kembali lagi melaut. Mereka perlu sarana dan prasarana yang telah lama ditinggalkan ketika usaha rumput laut berjaya dan untuk beradaptasi kembali ke perikanan tangkap perlu waktu.

Dari Tabel 3.3. menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan rumah tangga dari usaha budi daya rumput laut pada tahun 2006 hampir mencapai Rp 500.000,- per bulan, namun kemudian turun menjadi Rp 328.608,- per bulan pada tahun 2008 dan pada tahun 2009 sudah tidak ada lagi rumah tangga memiliki pendapatan dari usaha budi daya rumput laut. Pendapatan rumah tangga dari kerajinan tenun mengalami sedikit kenaikan pada tahun 2009 dibandingkan tahun 2008, meskipun belum mencapai angka seperti tahun 2006. Hal ini sebagai akibat angkatan kerja perempuan, terutama ibu-ibu rumah tangga yang kehilangan mata pencaharian dari budi daya rumput laut dan sebagian beralih sebagai pengrajin tenun. Nampaknya pemasaran hasil kerajinan tenun tradisional cukup baik. Sementara rata-rata pendapatan rumah tangga dari sektor jasa justru terus meningkat. Sebagian dari kepala rumah tangga adalah PNS (sebagai guru) dan pegawai swasta yang penghasilannya justru semakin membaik. Juga jasa bengkel perbaikan kapal juga meningkat sebagai akibat mulai banyak nelayan yang akan kembali melaut menangkap ikan, namun perlu perbaikan kapal dan alat tangkap. Untuk itu memerlukan jasa para bengkel.

Tabel 3.3 : **Distribusi Pendapatan Menurut Lapangan Kerja/Sektor, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009**

Lapangan Pekerjaan/ Sektor	Rata-Rata Pendapatan / Bulan			
	Tahun 2006 (dalam Rp)	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tahun 2009 (dalam Rp)	Perubahan 2006-2009 (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perikanan tangkap	638.080	226.483	257.666	- 59,6
Perikanan budi daya rumput laut	493.155	328.608	-	- 100,0
Pertanian(tanaman pangan/keras	323.160	54.396	61.795	- 80,8
Perdagangan	1.307.333	294.027	334.889	- 74,4
Jasa (guru, karyawan, bengkel, tukang urut dsb.	379.306	431.021	614.922	+ 62,1
Industri pengolahan (tenun, buat minyak kelapa dsb)	223.697	125.416	142.686	- 36,2
Lainnya	-	194.166	221.666	-

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2007, 2008 & 2009

Catatan : Usaha budi daya rumput laut di Desa Kojadoi tahun 2009 telah habis, terkena hama ais-ais dan pupuk GT, perairan rusak, belum ada usaha budi daya lagi, menunggu kondisi alam perairan normal kembali.

c. Pendapatan rumah tangga nelayan di Desa Kojadoi

Sehubungan dengan hancurnya usaha budi daya rumput laut, nampaknya usaha penangkapan ikan ada kecenderungan meningkat lagi, meskipun belum semarak sebelum berkembangnya usaha budi daya rumput laut. Dibandingkan dengan tahun 2008, pada tahun 2009 rata-rata pendapatan kenelayanan mengalami peningkatan. Bagi penduduk Desa Kojadoi tidak ada alternatif lain kecuali harus kembali melaut, sebab potensi yang ada adalah ikan. Hanya harus diwaspadai dan terus disadarkan jangan sampai meningkatnya usaha panangkapan ikan menggunakan alat tangkap (potassium, bom, pukat harimau dsb.) yang merusak terumbu karang dan menghabiskan biota laut, tanpa mempertimbangkan kelestariannya.

Pada masa gelombang tenang dan pancaroba para nelayan yang memiliki penghasilan maksimal rata-rata pendapatannya jauh lebih tinggi pada tahun 2009 dibandingkan pada tahun 2006. Ini menunjukkan bahwa dengan hancurnya usaha budi daya rumput laut ada sebagian nelayan yang sudah mulai lagi melakukan kegiatan penangkapan biota laut, khususnya ikan. Namun kegiatan tersebut banyak yang hanya dilakukan pada musim gelombang tenang dan musim pancaroba. Ini berarti bahwa mereka belum menggunakan armada dan alat tangkap yang modern, sehingga sebagian mereka belum berani melakukan kegiatan penangkapan pada musim gelombang kuat. Peningkatan pendapatan pada rumah tangga dalam kegiatan kenelayanan tersebut nampaknya hanya terjadi pada kelompok mereka yang pendapatan tinggi.

Tabel 3.4 : Statistik Pendapatan Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan, Tahun 2006 – 2009 Menurut Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka

Pendapatan	Musim	Rata-Rata Pendapatan/ Bulan			
		Tahun 2006 (dlm Rp)	Tahun 2008 (dlm Rp)	Tahun 2009 (dlm Rp	Perubahan 2008-2009 (persen)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rata-Rata	Gel.Tenang	682.625	328.500	687.735	+ 109,3
	Pancaroba	625.492	166.875	420.042	+ 151,7
	Gel.Kuat	606.125	184.074	49.550	- 73,1
Median	Gel.Tenang	698.333	200.000	200.000	0,0
	Pancaroba	664.125	75.000	100.000	+ 33,3
	Gel. Kuat	609.125	30.000	50.000	+ 66,7
Minimum	Gel.Tenang	100.000	10.000	15.000	+ 50,0
	Pancaroba	130.000	10.000	2.500	- 75,0
	Gel. Kuat	100.000	10.000	10.000	0,0
Maksimum	Gel.Tenang	1.446.666	1.500.000	4.080.000	+ 172
	Pancaroba	1.376.666	1.000.000	3.720.000	+ 272
	Gel. Kuat	1.376.000	1.000.000	75.000	- 925
Jumlah RT Nelayan (N)	Gel.Tenang	34	35	35	
	Pancaroba	34	32	17	
	Gel. Kuat	34	27	10	

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2007, 2008 dan 2009

Bagaimana distribusi persentase rumah tangga nelayan menurut kelompok pendapatan dan musim dari tahun 2006 – 2009. Pendapatan rumah tangga nelayan pada musim-musim gelombang tenang ada kecenderungan meningkat dari tahun 2006 – 2009. Pada tahun 2009 jumlah rumah tangga yang pendapatannya di atas Rp 2 juta ke atas meningkat, yang tahun sebelumnya tidak pernah ada, namun pada tahun 2009 ada 5,8 persen. Kecenderungan tersebut juga nampak pada musim pancaroba, bahkan makin nyata di mana jumlah rumah tangga yang penghasilannya per bulan antara Rp 1,5 juta – Rp 1,999 juta mencapai 5,9 persen dan kelompok penghasilan di atas Rp 2 juta ke atas mencapai 17,6 persen. Sementara pada tahun-tahun sebelumnya tak ada satu rumah tanggapun yang mencapai pendapatan di atas Rp 1,5 juta.

Pada musim gelombang kuat nampaknya makin jarang nelayan yang berani melaut di laut dalam. Pada tahun 2009 hampir semua nelayan pendapatannya rumah tangga hanya di bawah Rp 500.000. Ini menunjukkan bahwa armada yang digunakan pada tahun 2009 tidak besar. Armada-armada perahu yang besar sudah lama rusak dan tidak digunakan lagi selama usaha rumput laut berjaya dulu.

Tabel 3.5 : **Distribusi Persentase Rumah Tangga Nelayan Menurut Kelompok Pendapatan dan Musim, Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi), Kab. Sikka, 2006 – 2009**

Gelombang/ Tahun	*Pendapatan/ Bulan (000 Rp)*				
	< 500	500-999	1.000-1.499	1.500-1.999	2.000 +
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gelombang Tenang :					
Tahun 2006	32,4	47,1	20,6	0,0	0,0
Tahun 2008	83,9	8,6	2,9	5,7	0,0
Tahun 2009	82,9	5,7	2,9	2,9	5,8
Pancaroba :					
Tahun 2006	38,2	50,0	11,8	0,0	0,0
Tahun 2008	87,5	9,4	3,1	0,0	0,0
Tahun 2009	76,5	0,0	0,0	5,9	17,6
Gelombang Kuat :					
Tahun 2006	35,3	50,0	14,7	0,0	0,0
Tahun 2008	85,2	11,1	3,7	0,0	0,0
Tahun 2009	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2007, 2008 dan 2009

3.2.1.2. Pendapatan masyarakat di Desa Namangkewa

a. *Pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita di Desa Namangkewa*

Berbeda dengan kawasan pulau-pulau kecil Desa Kojadoi, di Desa Namangkewa secara umum justru terjadi peningkatan pendapatan yang cukup tinggi dari tahun 2008 ke tahun 2009. Rata-rata pendapatan per kapita telah meningkatkan hampir empat lipat, yaitu dari Rp 109.559,- pada tahun 2008 menjadi Rp 566.790,-. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut disebabkan rata-rata pendapatan masyarakat juga meningkat cukup berarti.

Rata-rata pendapatan rumah tangga per bulan di Desa Namangkewa telah terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Peningkatan pendapatan dari Rp 581.367,- pada tahun 2008 menjadi lebih dari dua juta rupiah pada tahun 2009. Pendapatan median rumah tangga telah meningkat dari Rp 300.000,- menjadi Rp Rp 1.061.666,-. Pendapatan minimum rumah tangga juga mengalami kenaikan dari hanya Rp 3.333,- menjadi Rp 33.333,-, sementara pendapatan maksimal rumah tangga terjadi peningkatan tajam dari Rp 2.500.000,- menjadi Rp 19.158.333,-. Peningkatan maksimal pendapatan rumah tangga yang sangat tinggi ini yang menyebabkan rata-rata pendapatan rumah tangga dan pendapatan per kapita ternjadi peningkatan yang tinggi. Kemudian dari sektor mana yang memberi kontribusi terbesar dalam peningkatan rata-rata rumah tangga. Hal tersebut dibahas dalam subbab berikutnya, mengenai rata-rata pendapatan rumah tangga menurut sektor/lapangan pekerjaannya.

Tabel 3.6 : Statistik Pendapatan Rata-rata Rumah Tangga dan Per Kapita, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab.Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009

Pendapatan/ Bulan	Jumlah		
	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tahun 2009 (dalam Rp)	Pertambahan (2008-2009) (persen)
(1)	(2)	(4)	(5)
Per Kapita	109.559	566.790	417
Rata-Rata Rumah Tangga	581.367	2.622.756	351
Median	300.000	1.061.666	253
Minimum Rumah Tangga	3.333	33.333	909
Maksimum Rumah Tangga	2.500.000	19.158.333	666

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2008 dan 2009

Catatan : Data rumah tangga sampel tahun 2006 tak dapat dibandingkan karena sebelum pemekaran (tahun 2006) masih bergabung dengan Desa Wiara dan Geliting dan setelah pemekaran dua desa tersebut tidak menjadi sasaran Program COREMAP II. Hanya Desa Namangkewa yang masih menjadi sasaran Program COREMAP II.

Distribusi pendapatan rumah tangga sampel di Desa Namangkewa dibedakan menurut kelompok pendapatan menunjukkan gambaran yang menarik. Pada rumah tangga pada kelompok pendapatan Rp 500.000 – Rp 999.000 per bulan dan kelompok pendapatan di bawah Rp 500.000 per bulan telah terjadi penurunan yang berarti, terutama pada kelompok pendapatan paling bawah. Sementara pada kelompok pendapatan di atas Rp 1.000.000,- telah mengalami peningkatan yang cukup besar. Sekitar 40 persen rumah tangga sampel ternyata menerima pendapatan di atas Rp 1.500.000,- per bulan.

Tabel 3.7 : Distribusi Rumah Tangga Menurut Kelompok/Kategori Pendapatan, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009

Kelompok/Kategori Pendapatan/ Bulan (dalam rupiah)	Frekuensi		
	Tahun 2008 (persen)	Tahun 2009 (persen)	Perubahan (persen)
(1)	(2)	(4)	(5)
< 500.000	65,5	27,8	- 37,7
500.000 – 999.000	17,2	14,8	-2,4
1.000.000 – 1.499.000	5,2	16,7	+ 11,5
1.500.000 ke atas	12,1	40,7	+ 28,6
Jumlah	100,0	100,0	-
Pendapatan Rata-Rata (Rp)			

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2008 dan 2009

b. Pendapatan menurut lapangan kerja di Desa Namangkewa

Sektor-sektor/lapangan pekerjaan mana yang mengalami peningkatan pendapatan?. Tabel 3.8 menunjukkan bahwa ternyata pada rumah tangga hampir di semua sektor yang mengalami peningkatan dengan berbagai variasi. Hanya rumah tangga di sektor jasa yang mengalami penurunan, kendati mereka masih berada di atas Rp 1.000.000,- ke atas per bulan. Peningkatan pendapatan yang cukup signifikan terjadi pada rumah tangga di perikanan tangkap, perdagangan dan industri. Peningkatan pendapatan yang tidak begitu tinggi terjadi pada rumah tangga di sektor pertanian (tanaman pangan dan tanaman keras). Ini menunjukkan bahwa sektor pertanian yang dikenal sebagai sektor yang menyerap tenaga kerja paling banyak, namun tingkat pertumbuhan dan produktivitasnya masih rendah. Peningkatan pendapatan dari perikanan tangkap sangat terkait dengan peningkatan kemampuan armada dan alat tangkap. Sementara peningkatan pendapatan dari perdagangan juga dapat terkait dengan peningkatan perputaran uang dan pengaruh peningkatan inflasi. Peningkatan

pendapatan juga meningkatkan daya beli masyarakat, tapi juga mungkin meningkatkan tingkat konsumsi masyarakat.

Tabel 3.8 : Distribusi Pendapatan Menurut Lapangan Kerja/Sektor, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka, Tahun 2006, 2008 dan 2009

Lapangan Pekerjaan/ Sektor	Rata-Rata Pendapatan / Bulan		
	Tahun 2008 (dalam Rp)	Tahun 2009 (dalam Rp)	Perubahan (persen)
(1)	(2)	(4)	(5)
Perikanan tangkap	512.037	2.168.083	323
Perikanan budi daya rumput laut	-	10.221	-
Pertanian(tanaman pangan/keras	254.255	311.903	22,6
Perdagangan	598.402	3.881.697	548
Jasa (bengkel, tukang urut dsb.	1.619.583	1.086.931	- 32,9
Industri pengolahan (tenun, buat minyak kelapa dsb)	296.666	914.354	208
Lainnya	653.916	833.333	27,4

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2008 dan 2009

c. Pendapatan rumah tangga nelayan di Desa Namangkewa

Peningkatan rata-rata pendapatan kenelayanan per bulan cukup tinggi antara tahun 2008 dan 2009. Rata-rata pendapatan per bulan dalam berbagai musim mengalami peningkatan dari tahun 2008 ke tahun 2009. Peningkatan pendapatan tidak hanya terjadi pada rata-rata (mean) pendapatan, tapi juga pada median, minimum dan maksimum pendapatan. Hanya sayang kasus rumah tangga kenelayanan yang menjadi sampel cukup kecil, hanya 7 rumah tangga. Kenaikan pendapatan pada kenelayanan ini sangat mungkin karena adanya

peningkatan jumlah/ kemampuan armada dan alat tangkap yang mereka gunakan dalam setahun terakhir. Hal ini dapat dikatakan demikian sebab kenaikan pendapatan tersebut terjadi pada semua musim.

Tabel 3.9 : Statistik Pendapatan Rumah Tangga Kegiatan Kenelayanan, Tahun 2006 – 2009 Menurut Musim, Kawasan Daratan (Desa Namangkewa), Kab. Sikka

Pendapatan	Musim	Rata-Rata Pendapatan/ Bulan		
		Tahun 2008 (dalam Rp)	Tahun 2009 (dalam Rp	Perubahan 2008-2009 (persen)
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)
Rata-Rata	Gel. Tenang	861.363	3.750.857	+ 335
	Pancaroba	290.500	2.447.571	+ 742
	Gel. Kuat	125.714	913.571	+ 627
Median	Gel. Tenang	300.000	2.820.000	+ 840
	Pancaroba	162.500	3.075.000	+ 1792
	Gel. Kuat	80.000	732.000	+ 815
Minimum	Gel. Tenang	10.000	200.000	
	Pancaroba	30.000	140.000	
	Gel. Kuat	10.000	80.000	
Maksimum	Gel. Tenang	4.380.000	9.972.000	
	Pancaroba	900.000	5.076.000	
	Gel. Kuat	300.000	1.900.000	
Jumlah RT Nelayan (N)	Gel. Tenang	7	7	
	Pancaroba	10	7	
	Gel. Kuat	11	7	

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2008 dan 2009

3.2.2. Kecenderungan perubahan pendapatan dari kegiatan COREMAP

Subbab kedua ini berusaha mengkaji peran kegiatan COREMAP terhadap pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembahasan berikut ini lebih pada rumah tangga sampel yang menjadi anggota Pokmas COREMAP dan Pokmas non COREMAP. Dalam pembahasan akan dibedakan antara anggota Pokmas yang sudah menerima dana bergulir untuk penguatan modal usaha dengan mereka

yang belum menerima dana bergulir. Kemudian bantuan dalam bentuk fisik (seperti dana dari *village grant*) yang terkait dengan pendapatan dan kesejahteraan juga dibahas.

3.2.2.1. Pendapatan anggota Pokmas di Desa Kojadoi

a. Pendapatan anggota Pokmas COREMAP Fase II

Sebagaimana telah diungkapkan dalam subbab sebelumnya bahwa dana bergulir COREMAP Fase II di Desa Kojadoi sampai Mei 2009 belum didistribusikan atau digulirkan ke penduduk, karena ada beberapa permasalahan. Padahal program COREMAP Fase II sudah harus berakhir akhir tahun 2009. Oleh karena itu, jelas program COREMAP Fase II ini secara ekonomi sama sekali belum ada dampaknya terhadap rumah tangga di Desa Kojadoi. Bahkan seperti telah diuraikan di atas perekonomian masyarakat desa ini makin terpuruk. Berbagai informan memang masih sangat mengharapkan bantuan dana bergulir dari COREMAP untuk membangkitkan kembali ekonomi mereka. Oleh karena itu, mereka sangat mengharapkan bahwa program COREMAP terus dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Juga mereka memerlukan pendamping/ fasilitator desa yang baik, berkualitas, mau tinggal di desa dan mau bekerjasama dengan masyarakat.

Di Desa Kojadoi program COREMAP yang berupa bantuan (*village grant*) untuk fisik senilai Rp 75 juta berasal dari anggaran tahun 2007/2008. Dana tersebut telah digunakan untuk membuat pipanisasi air bersih di Dusun Kojadoi dan pembuatan MCK di Dusun Margajong dan Dusun Kojagete. Program ini tidak secara langsung berdampak terhadap pendapatan masyarakat Desa Kojadoi. Namun program ini telah ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu untuk peningkatan pemenuhan kebutuhan air bersih, kesehatan dan lingkungan.

b. Pendapatan anggota Pokmas di luar COREMAP II

Subbab ini ingin membandingkan pendapatan rumah tangga yang mendapat dana bergulir di luar COREMAP dan pendapatan rumah

tangga yang tidak mendapat dana bergulir. Di Desa Kojadoi telah mendapat bantuan-bantuan yang berasal dari program PNPM (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat) dari Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat/Desa dan program Bansos (Bantuan Sosial) dari Departemen Perikanan dan Kelautan.

Program PNPM telah masuk Desa Kojadoi sejak tahun 2003, sampai tahun 2009 sudah empat kali bergulir. Jumlah uang yang dipinjam cukup besar, tiap rumah tangga bisa mencapai belasan juta rupiah. Sasarannya adalah rumah tangga miskin, hanya syaratnya mereka sudah punya usaha yang sudah berjalan. Mereka memerlukan tambahan modal untuk penguatan usaha, namun mereka sedang tidak punya pinjaman di lembaga lain. Bantuan dari program PNPM inipun juga belum mampu mengangkat kembali perekonomian penduduk di Desa Kojadoi, karena penduduk belum berani menanam rumput laut kembali. Bahkan banyak kalangan penduduk yang masih takut pinjam uang dari PNPM, takut kalau usahanya gagal dan tidak mampu mengembalikan uang, apalagi masih ditambah dengan bayar bunga.

Sebelum munculnya wabah hama rumput laut (tahun 2003-2006) pernah ada program bantuan sosial (Bansos) dari DKP yang tujuannya memberikan bantuan untuk pembelian bibit rumput laut. Bantuan yang berupa uang tersebut harus dibelikan bibit rumput laut. Dana tersebut merupakan dana hibah. Namun semenjak adanya hama rumput laut dan penggunaan pupuk *green tonic* (GT) bantuan tersebut sementara diberhentikan. Dengan demikian belum ada program yang menolong keterpurukan ekonomi penduduk Desa Kojadoi pada tahun 2008-2009.

Tabel 3.10 : Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Yang Mendapat/ Tidak Dana Bergulir Selain COREMAP II, Desa Kojadoi, 2009.

Statistik Pendapatan Rumah Tangga	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga/Bulan		
	Ya, mendapat dana bergulir di luar COREMAP II	Tidak, mendapat dana bergulir di luar COREMAP II	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Mean	535.232	360.768	495.105
Median	241.666	250.000	245.833
Minimum	38.333	41.666	38.333
Maksimum	3.000.000	1.300.000	3.000.000
N	77	23	100

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2009

3.2.2.2. Pendapatan anggota Pokmas di Desa Namangkewa

a. Pendapatan anggota Pokmas COREMAP Fase II

Dana bergulir dari program COREMAP Fase II diharapkan dapat memberikan manfaat untuk membantu peningkatan pendapatan rumah tangga anggota Pokmas. Di Desa Namangkewa, meskipun dana bergulir dari COREMAP Fase II telah digulirkan ke anggota Pokmas, namun jumlah keseluruhan dana yang digulirkan masih terlalu kecil, jumlah peminjam baru mencapai 29 rumah tangga. Mereka mendapatkan pinjaman dana bergulir hanya sekitar Rp 2 juta. Dana tersebut digulirkan belum mencapai satu bulan, pada saat kajian ini dilakukan. Oleh karena itu, belum ada korelasi antara pendapatan rumah tangga yang mendapatkan dana bergulir dari COREMAP Fase II dengan pendapatan rumah tangga yang belum mendapatkan dana tersebut. Mereka yang mendapatkan dana bergulir tersebut belum merasakan adanya peningkatan pendapatan sebagai akibat bantuan pinjaman dana bergulir, sebab belum mencapai satu bulan mereka menerima pinjaman. Hanya

manfaat yang telah dirasakan adalah dapat menambah penguatan modal usaha, bagi mereka yang telah memiliki usaha. Kemudian penguatan modal tersebut ada/ tidak pengaruh terhadap peningkatan keuntungan/ pendapatan belum dapat dikaji.

Selanjutnya apabila dikaitkan dengan rumah tangga kenelayanan jelas belum bisa dikaji, sebab para penerima dana bergulir COREMAP Fase II saat ini belum satupun rumah tangga nelayan yang mendapatkan kesempatan meminjam. Menurut informan pengelola para rumah tangga nelayan akan menerima pinjaman dana bergulir pada kesempatan berikutnya. Para pengelola tersebut mengambil kebijakan tersebut, karena pada COREMAP Fase I para nelayan telah menerima pinjaman dana bergulir. Untuk kesempatan kali ini diprioritasnya rumah tangga non nelayan. Di samping demi keadilan juga agar pengembaliannya lancar. Menurut pengetahuan para pengelola pada COREMAP Fase I banyak pinjaman yang macet.

Tabel 3.11 : Rata-rata Pendapatan Anggota Pokmas COREMAP Fase II dan Bukan Anggota Pokmas

Statistik Pendapatan Rumah Tangga	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga/Bulan		
	Ya, mendapat dana bergulir COREMAP II	Tidak, mendapat dana bergulir COREMAP II	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Mean	2.043.400	2.681.874	2.622.756
Median	2.238.333	1.061.666	1.061.666
Minimum	279.166	33.333	33.333
Maksimum	3.600.000	19.158.333	19.158.333
N	5	49	54

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2009

Di Desa Namangkewa bantuan COREMAP untuk pembangunan fisik juga berasal dari dana *village grant*. Dana ini telah dicairkan tahun 2008 dan telah digunakan untuk membuat bak air dan pipanisasi. Dengan adanya pipanisasi ini telah mengalirkan air bersih untuk sebagian rumah tangga di Dusun Namangseda dan Namangkewa. Sementara di Dusun Namangjawa yang terletak di wilayah paling bawah (pantai) belum kebagian air bersih dari progam ini, karena dana untuk pipanisasi masih kurang. Program fisik ini meskipun secara tidak langsung tidak ada pengaruhnya terhadap pendapatan masyarakat, namun ikut meningkatkan kesejahteraan sebagian masyarakat dengan terpenuhinya air bersih. Dalam hal ini diharapkan adanya partisipasi masyarakat dan program-program di luar COREMAP dapat meneruskan pipanisasi, sehingga selurauh masyarakat desa bisa menikmatinya.

b. Pendapatan anggota Pokmas di luar COREMAP Fase II

Fakta menunjukkan bahwa ternyata pendapatan rumah tangga yang mendapatkan dana bergulir di luar COREMAP di Desa Namangkewa lebih baik dibandingkan yang tidak mendapatkan dana bergulir. Seperti di Desa Kojadoi, di Namangkewa juga ada program PNPM yang menggulirkan pinjaman untuk penguatan modal. Nampaknya program ini cukup berhasil membantu para pengusaha kecil meningkatkan usaha dengan tambahan modal dan sekaligus meningkatkan pendapatan. Sementara bantuan sosial untuk bibit rumput laut di Desa Namangkewa juga pernah mendapatkannya, namun belum mampu meningkatkan usaha budi daya rumput laut di desa ini dan nelayan budi daya rumput laut di desa ini masih sedikit jumlahnya.

Tabel 3.12 : Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Yang Mendapat/ Tidak Dana Bergulir Selain COREMAP Fase II, Desa Namangkewa, 2009.

Statistik Pendapatan Rumah Tangga	Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga/Bulan		
	Ya, mendapat dana bergulir di luar COREMAP II	Tidak, mendapat dana bergulir di luar COREMAP II	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Mean	2.973.708	1.416.313	2.622.756
Median	1.156.250	975.000	1.061.666
Minimum	300.000	33.333	33.333
Maksimum	19.158.333	9.750.000	19.158.333
N	20	34	54

Sumber : Hasil CRITC-COREMAP Fase II-LIPI Tahun 2009

BAB IV

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

4.1. KESIMPULAN

- *Pengetahuan tentang pelestarian dan kegiatan COREMAP*

  Di Desa Kojadoi sebagian besar masyarakat telah mengetahui tentang pelestarian dan kegiatan COREMAP. Program COREMAP telah lama masuk (sejak tahun 2000 – COREMAP Fase I) dan cukup dikenal sebagian besar masyarakat Kojadoi. Sebagian besar masyarakat merupakan rumah tangga nelayan yang kehidupan utamanya menggantungkan pada sumber daya laut.

  Sementara di Desa Namangkewa hanya kurang dari separoh penduduk sampel yang telah mengetahui tentang pelestarian dan kegiatan COREMAP. Meskipun program COREMAP telah lama masuk desa ini, sebab sebagian besar masyarakatnya tidak menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut. Sehingga perhatian terhadap pengetahuan dan kegiatan yang terkait dengan pelestarian sumber daya laut, termasuk terumbu karang masih rendah.

- *Perubahan perilaku masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya laut*

  Perubahan perilaku masyarakat yang terkait dengan sumber daya laut termasuk terumbu karang telah cukup besar. Penggunaan bom dan potasium untuk menangkap biota laut sudah tidak ada lagi dan pemakai alat tangkap tersebut biasanya berasal dari luar desa dan telah dianggap sebagai musuh bersama. Alat tangkap yang digunakan para nelayan umumnya yang lebih ramah terhadap lingkungan termasuk terumbu karang. Di Desa Kojadoi sebagian besar nelayan telah lama beralih mata pencaharian dari nelayan tangkap menjadi nelayan budi daya rumput laut. Meskipun pada satu tahun terakhir (tahun 2008/2009) usaha budi daya rumput laut sedang mengalami kehancuran karena hama ais-ais dan penggunaan pupuk (GT) yang tidak ramah lingkungan. Akibat hancurnya usaha budi daya rumput laut, khir-akhir ini sebagian nelayan telah mulai kembali menangkap ikan di laut. Namun mereka telah sadar dan tetap tak menggunakan lagi alat tangkap yang merusak terumbu karang dan biota laut lainnya.

- *Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP*

  Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP di Desa Kojadoi sudah cukup besar. Kegiatan mulai dari pembentukan kelembagaan LPSTK, pelatihan, kegiatan UEP dan *village grant* di desa ini cukup baik. Meskipun dana bergulir untuk kegiatan UEP pada tahun terakhir agak terhambat belum dicairkan. Pada umumnya masyarakat mengharapkan kegiatan COREMAP terus dilanjutkan termasuk dana bergulir untuk menguatan modal usaha budi daya rumput laut. Di Desa Namangkewa hanya sebagian kecil masyarakat yang berpartisipasi dan kegiatan COREMAP. Sebab sebagian besar masyarakat tidak menggantungkan kehidupannya pada sumber daya laut.

- *Manfaat sosial - ekonomi (langsung/tak langsung) kegiatan COREMAP*

  Manfaat sosial yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya kegiatan COREMAP selama ini untuk Desa Kojadoi adalah dengan adanya dana *village grant* untuk MCK dan air bersih telah meningkatkan kesehatan dan sanitasi masyarakat. Sedangkan program listrik bermanfaat untuk penerangan rumah, penerangan belajar anak dan sebagai sumber informasi melalui televisi dan radio. Di Desa Namangkewa dana *village grant* untuk pembangunan bak air dan pipanisasi. Manfaat yang dirasakan masyarakat adalah peningkatan kebutuhan air bersih dan kesehatan masyarakat.

  Manfaat ekonomis kegiatan COREMAP Fase II yang berupa dana bergulir untuk penguatan modal usaha belum ada. Di Kojadoi dana bergulir belum didistribusikan ke masyarakat. Sementara di Desa Namangkewa distribusi dana bergulir telah dilakukan, namun belum ada satu bulan dari waktu kajian dilakukan, sehingga belum dapat diketahui dampaknya terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga. Baik di Kojadoi maupun di Namangkewa ada keluhan dari pengurus LKM bahwa belum pernah ada pelatihan-pelatihan tentang cara pengelolaan dan prosedur peminjaman dana bergulir, juga belum memiliki buku pedoman pengelolaan dana bergulir.

4.2. REKOMENDASI

- Pengetahuan tentang pelestarian terumbu karang dan biota laut harus terus berlanjut dan ditingkatkan, agar masyarakat tidak kembali lagi melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya laut yang merusak. Hal ini terutama di Desa Namangkewa yang banyak masyarakat yang pengetahuannya tentang terumbu karang masih harus ditingkatkan.
- Peningkatan tingkah laku yang tidak merusak kelestarian terumbu karang harus terus ditingkatkan dengan terus

memberikan kesadaran masyarakat dengan memanfaatkan pondok informasi yang selama ini belum berfungsi. Pondok informasi harus diperkaya dengan buku-buku dan pamlet-pamlet yang memadai. Juga perlunya sosialisasi melalui sekolah-sekolah yang pernah dilakukan pada COREMAP Fase I, namun akhir-akhir ini mulai melemah karena kurangnya sarana sosialisasi.

- Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak lagi menggunakan pupuk GT (*green tonic*) yang ternyata sangat merusak lingkungan dan mematikan biota laut termasuk rumput laut, terutama di Desa Kojadoi.

- Dana bergulir untuk penguatan modal usaha untuk mulai kembali budi daya rumput di Desa Kojadoi perlu ditingkatkan jumlahnya dan segera diturunkan ke masyarakat nelayan, agar ekonomi mereka segera bangkit lagi. Hanya dalam membudi dayakan rumput laut kembali perlu pendampingan dan kajian lingkungan, apakah perairan di Desa Kojadoi sudah bisa ditanam kembali rumput laut. Sedangkan untuk pemasaran hasil perlu peran koperasi yang ada dihidupkan kembali. Di Desa Namangkewa dana bergulir juga harus ditingkatkan jumlahnya, agar dapat menyentuh lebih banyak anggota masyarakat utamanya rumah tangga nelayan, agar kesejahteraan mereka meningkat.

- Baik di Desa Kojadoi maupun di Namangkewa kualitas dan peran LKM harus ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan cara pengelolaan dana bergulir yang baik disertai pemberian pedoman-pedoman tertulis yang jelas atau mudah dipahami dan dilaksanakan. Peran Fasilitator Desa (FD) dan Motivator Desa (MD) perlu ditingkatkan kemampuannya untuk membantu LKM, selama ini peran mereka masih sangat kurang.

Tabel 4.1 : Resume Hasil Pelaksanaan COREMAP Fase II di Desa Kojadoi dan Namangkewa.

No	Pelaksanaan COREMAP	Kawasan Pulau-Pulau Kecil (Desa Kojadoi)	Kawasan Daratan (Desa Namangkewa)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengetahuan ttg pelestarian &kegiatan COREMAP	Sebagian besar masy. telah mengetahui tentang pelestarian &kegiatan COREMAP, sebag besar masy. nelayan.	Kurang dari 50 persen masy yang mengetahui ttg pelestarian & kegiat an COREMAP, sebag kecil masy. pantai/ nela yan.
2.	Perubahan perilaku masy terkait pengelola an SDL	Perilaku penangkapan SDL dengan bom & pestisida sudah tidak dilakukan lagi. Penangkapan SDL hanya di pantai menggunakan pancing dan jaring. Sebagian besar masy tak melaut lagi, telah pindah kegiatan ekonomi ke budi daya rumput laut. Akibat budi daya rumput laut hancur, tahun 2009 sebag. nelayan mulai melaut lagi (tangkap ikan)	Perilaku penangkapan SDL dengan bom & pes tisida sudah lama tak di lakukan. Alat tangkap digunakan yang tak merusak lingkungan (pancing, jala, rumpon)
3.	Partisipasi masy dalam pelaksanaan kegiatan COREMAP	Keterlibatan masy dalam pelestarian TK (65%) & pengawasan pesisir &laut (60%)cukup baik. Tapi keterlibatan dalam kegiatan lainnya masih rendah.	Keterlibatan masy dalam semua kegiatan COREMAP masih rendah (di bawah 30 %).
4.	Manfaat sosial (langsung/tak langsung) kegiatan COREMAP	Manfaat sosial – pembangunan fisik – peningkatan kesehatan, penerangan rumah, pendidikan dan informasi	Manfaat sosial – pembangunan fisik – peningkatan kebutuhan air bersih dan kesehatan,

5.	Manfaat ekonomi (langsung/tak langsung) kegiatan COREMAP	Program UEP COREMAP I dirasakan masy dalam usaha budi daya rumput laut, pada COREMAP II belum ada program UEP yang diperoleh masy/ dana ber gulir belum cair.	Program UEP COREMAP I kurang dirasakan masy, pada COREMAP II dana bergulir sudah digulir kan ke masy tapi jumlah dana kecil dan hanya menjangkau 29 orang anggota Pokmas dan belum menyentuh masy nelayan

DAFTAR PUSTAKA

CRITC – COREMAP FASE II – LIPI (2007)
Monitoring Ekologi Sikka. Jakarta: COREMAP Fase II – LIPI.

COREMAP AusAID bekerja sama dengan masyarakat Kojadoi (2003)
Rencana Kerja – Desa Koja Doi. Maumere: COREMAP Fase I Kabupaten Sikka.

COREMAP – LIPI (2006)
Studi Baseline Ekologi Perairan Maumere Kabupaten Sikka. Jakarta: COREMAP Fase II – LIPI.

CV Konindo (2006)
Laporan Akhir Penelitian Tingkat Kabupaten: Survey Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Sikka 2006. Maumere: CRITC – COREMAP Fase II – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

Daliyo, Soewartoyo, YB Widodo dan John Haba (2007)
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP FASE II: Kasus Kabupaten Sikka. Jakarta: CRITC – COREMAP Fase II – LIPI.

Daliyo, Soewartoyo, Sumono dan Zainal Fatoni (2008)
Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Lokasi COREMAP II Kepulauan Sikka : Hasil BME. Jakarta : COREMAP - LIPI

Dir. Jen. Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, DKP (2005)
'Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang'

---------- (2007)
'Penyusunan Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK)'.

---------- (2007a)
'Pedoman Umum Pengelolaan Berbasis Masyarakat COREMAP Fase II'

Lute, Maria Margaretha (2007)
Dokumen Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Desa Kojadoi Kecamatan Alok Timur. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

Lute, Maria Margaretha (2007)
Laporan Pelaksanaan Kegiatan PRA (Participatory Rural Appraisal) Desa Kojadoi Kecamatan Maumere. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

Pare, Paulus (2007)
Dokumen Rencana Pengelolaan Terumbu Karang (RPTK) Program COREMAP Fase II Desa Namangkewa, Kecamatan Kewapante. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

Pemerintahan Desa Kojadoi (2005)
Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa/Kelurahan: Desa Kojadoi Kecamatan Maumere Tahun 2005. Maumere: Pemerintahan Desa Kojadoi.

PMU – COREMAP Kab. Sikka (2005)
'Gambaran Umum Desa Pesisir Binaan COREMAP Fase I dan Calon Binaan COREMAP Fase II di Kab. Sikka, dalam Base Line Studi dilakukan PMU – COREMAP Kab. Sikka bekerjasama dengan Konsultan Jasa Patria Nusa Perkasa.

PT Patria Jasa Nusaprakarsa (2005)
Laporan Akhir Survey Sosial Ekonomi (Baseline Study) di Kabupaten Sikka. Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

Suharsono (2005)
www.COREMAP.or.id

Yayasan Kasih Insani (2006)
Laporan Pemantauan Kondisi Terumbu Karang Kabupaten Sikka Tahun 2006. Maumere: CRITC – COREMAP Fase II – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sikka.

Yayasan Pengembangan Perikanan Rakyat (2005)
Laporan Kegiatan Sosialisasi Program COREMAP Tingkat Desa (20 Desa Binaan COREMAP Fase II Kabupaten Sikka). Maumere: COREMAP Fase II Kabupaten Sikka.

M I L I K
PERPUSTAKAAN PPK - LIPI

PUSAT PENELITIAN KEMASYARAKATAN DAN KEBUDAYAAN * LIPI *

Implementasi COREMAP

Di Kabupaten Pangkajene: Partisipasi Masyarakat dan Manfaat Sosial Ekonomi